

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025



× × × ×



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang merupakan salah satu bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun akhir RPJMD 2021-2026. Laporan ini merupakan sarana pelaporan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan"*

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dapat pula dijadikan bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Sambas, Maret 2026

BUPATI SAMBAS



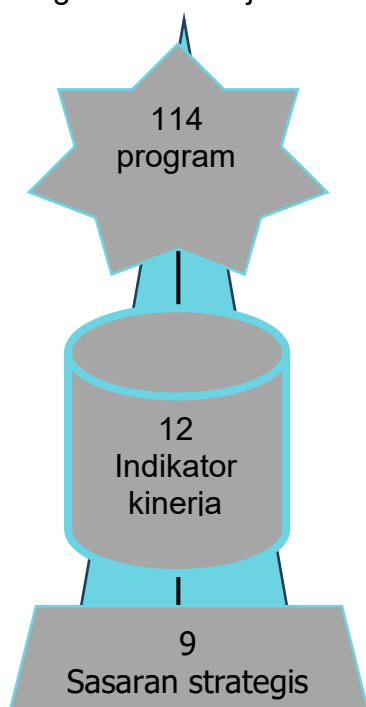
H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk mencapai agenda pembangunan dari visi yaitu:

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri atas :



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas sebagaimana SK Bupati Sambas Nomor 818/SETDA-OR/2024, Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang menjadi *core business* untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut dan diperlukan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dengan jumlah sebesar Rp. 1.440.771.206.452 dengan realisasi sebesar RP. 1.297.700.840.361 dengan capaian sebesar 90,07 persen.

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas:





Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, maka sebanyak 5 (lima) indikator kinerja mencapai target di atas 100% sedangkan 6 (enam) indikator kinerja mencapai target di bawah 100%, serta sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur capaian kinerjanya sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja secara umum dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat namun masih dibayangi oleh dampak negatif pandemi covid 19, ancaman resesi global dan perubahan iklim.
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kab. Sambas.
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
4. Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
5. Indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup
6. Prevalensi stunting yang sudah mulai menurun namun masih berada pada zona merah stunting di Kalimantan Barat
7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim
9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
10. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.



Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya dalam perbaikan kinerja kedepan dengan melakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pada komponen perencanaan kinerja, melakukan penyempurnaan dokumen akhir Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 2029. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini telah melalui evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan kaidah dan pedoman penyusunan RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Proses evaluasi dan tindak lanjut ini memastikan dokumen RPJMD sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang berorientasi hasil, komprehensif. Dengan demikian, dokumen RPJMD ini menjadi landasan yang kuat dan valid bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas dan terukur.
2. Pada komponen pengukuran kinerja, melaksanakan PKS antara Pemerintah Kab. Sambas dan Pemerintah Prov. Kalbar tentang Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP sebagaimana PKS Nomor : 02/TKKSD-TAPEM/PKS/2025 dan Nomor 100.2.2.3/02/SKU/RO-PEM. Aplikasi yang direplikasi akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga akan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja melalui data SIPD.
3. Pada komponen pelaporan kinerja, menjadikan laporan kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja kedepan sehingga target kinerja lebih realistis dan SMART, seperti contoh : Pertumbuhan Ekonomi dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 4,05 menjadi 4,8 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 4,69.
4. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sambas	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Kondisi Topografi	4
1.2.3. Kondisi Demografis	4
1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
1.2.5. Sumber Daya Aparatur	9
1.2.6. Sumber Daya Keuangan	10
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas.....	15
2.1.1. Visi	15
2.1.2. Misi	16
2.1.3. Tujuan	18
2.1.4. Sasaran	18
2.1.5. Strategi	19
2.1.6. Arah Kebijakan	22
2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi..	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas.....	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja	31



3.3. Realisasi Anggaran	84
3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025	84
3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025	87
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan	94
4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Ke Depan	96
Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	



Tabel 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2025	5
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas Tahun 2025.....	6
Tabel 3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang) Tahun 2023-2025 (Keadaan Bulan Desember 2025)	9
Tabel 4	Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang) Tahun 2023-2025 (Keadaan Bulan Desember 2025)	10
Tabel 5	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang) Tahun 2022-2025	10
Tabel 6	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 7	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	26
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2023	29
Tabel 9	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	31
Tabel 11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024-2025	32
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022-2025	32
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	33
Tabel 14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1	37
Tabel 15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.....	38
Tabel 16	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024-2025	39
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022-2025	39
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 dengan Target Akhir RPJMD dan Capaian Nasional	39



Tabel	19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	42
Tabel	20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.....	43
Tabel	21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024-2025	43
Tabel	22	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2025	43
Tabel	23	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 dengan Target Akhir RPJMD dan Capaian Nasional	44
Tabel	24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	48
Tabel	25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.....	49
Tabel	26	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024-2025	50
Tabel	27	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2022-2025	50
Tabel	28	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	50
Tabel	29	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4	53
Tabel	30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.....	54
Tabel	31	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024-2025	54
Tabel	32	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2022-2025	55
Tabel	33	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	55
Tabel	34	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5	57
Tabel	35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.....	58
Tabel	36	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024-2025	59
Tabel	37	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2022-2025	59
Tabel	38	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 6 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	60



Tabel	39	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6	63
Tabel	40	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.....	64
Tabel	41	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2024-2025	65
Tabel	42	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2022-2025	65
Tabel	43	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 7 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	66
Tabel	44	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7	75
Tabel	45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8.....	76
Tabel	46	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2024-2025	76
Tabel	47	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2022-2025	76
Tabel	48	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 8 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	77
Tabel	49	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8	79
Tabel	50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9.....	80
Tabel	51	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2024-2025	80
Tabel	52	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2022-2025	80
Tabel	53	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 9 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	81
Tabel	54	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 9	84
Tabel	55	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025	85
Tabel	56	Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2025	85
Tabel	57	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025	86
Tabel	58	Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2025	86
Tabel	59	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2025	87



Gambar	1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas	2
--------	---	---	---



Grafik 1	Luas Kecamatan (Km2) Kabupaten Sambas Tahun 20223.....	3
Grafik 2	Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2022	4
Grafik 3	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023-2025	34
Grafik 4	Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023-2025	34
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2023-2025	36
Grafik 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2023-2025	36
Grafik 7	Nilai SAKIP Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025	69



1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah disampaikan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah dan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sambas Tahun 2025.

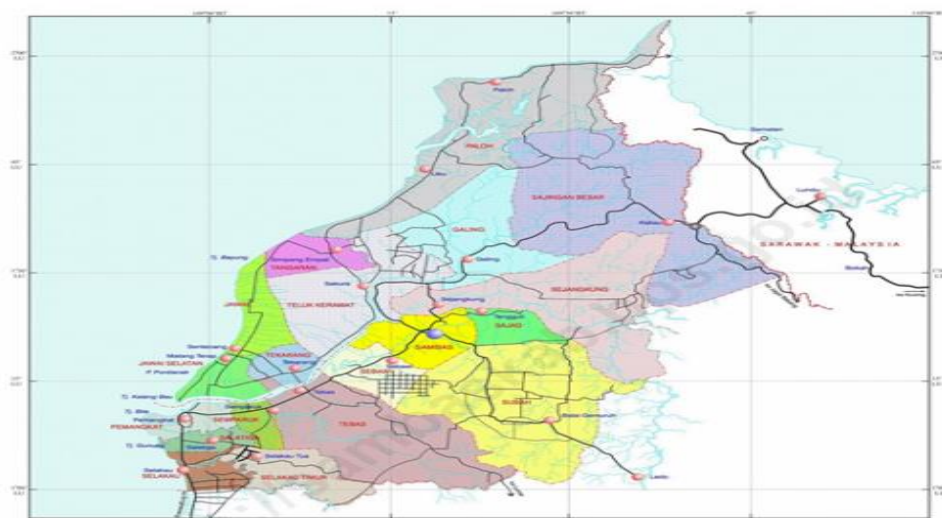
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sambas

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara $0^{\circ}57'29,8^{\circ}$ dan $2^{\circ}04'53,1^{\circ}$ Lintang Utara serta $108^{\circ}51'17,0^{\circ}$ dan $109^{\circ}45'7,56^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kabupaten Sambas termasuk salah satu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara asing yaitu Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Secara administratif, letak geografis Kabupaten Sambas berbatasan dengan :

Utara	: Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
Selatan	: Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
Timur	: Kabupaten Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur)
Barat	: Laut Natuna

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026.



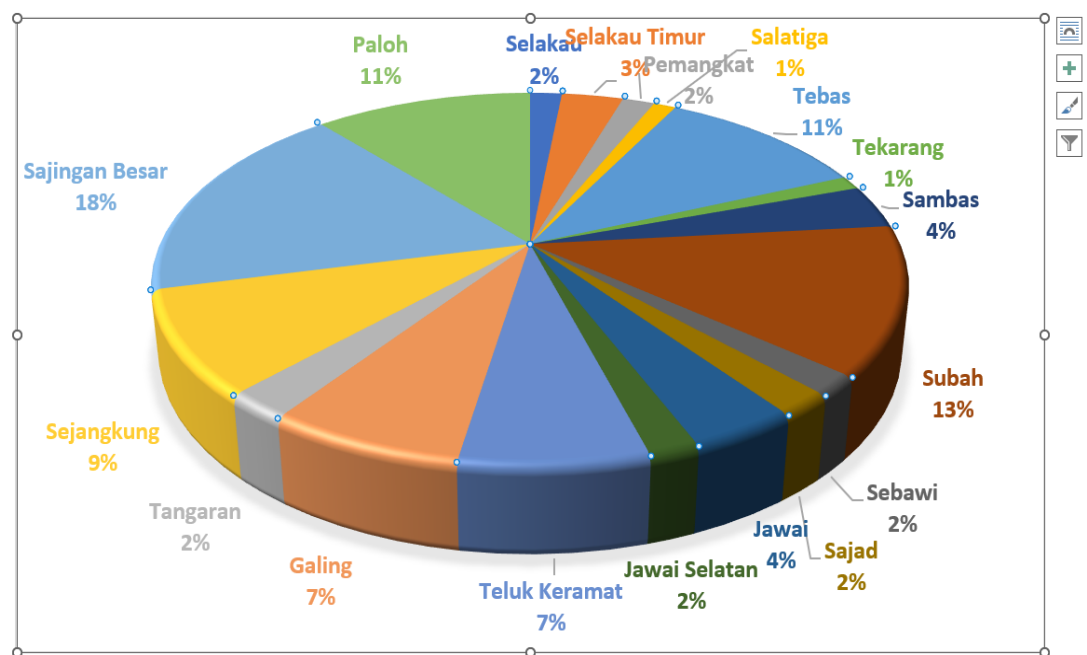
Luas Wilayah Kabupaten Sambas adalah 5.938 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai Kabupaten Sambas 198,76 km, perbatasan negara ± 97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 Km² dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kec. Selakau) hingga Tanjung Datok (Kec. Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu: Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102,56 km). Luas wilayah laut 12 mil dari darat: 1.467,84 km²

Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan dan 193 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.037,06 Km² atau 17,46% dari luas Kabupaten Sambas sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas 66,82 Km² atau 1,13% dari luas Kabupaten Sambas.

Luas wilayah Kabupaten Sambas menurut kecamatan (Km²) Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 1

Luas Kecamatan (Km²) Kabupaten Sambas Tahun 2025



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026



1.2.2. Kondisi Topografi

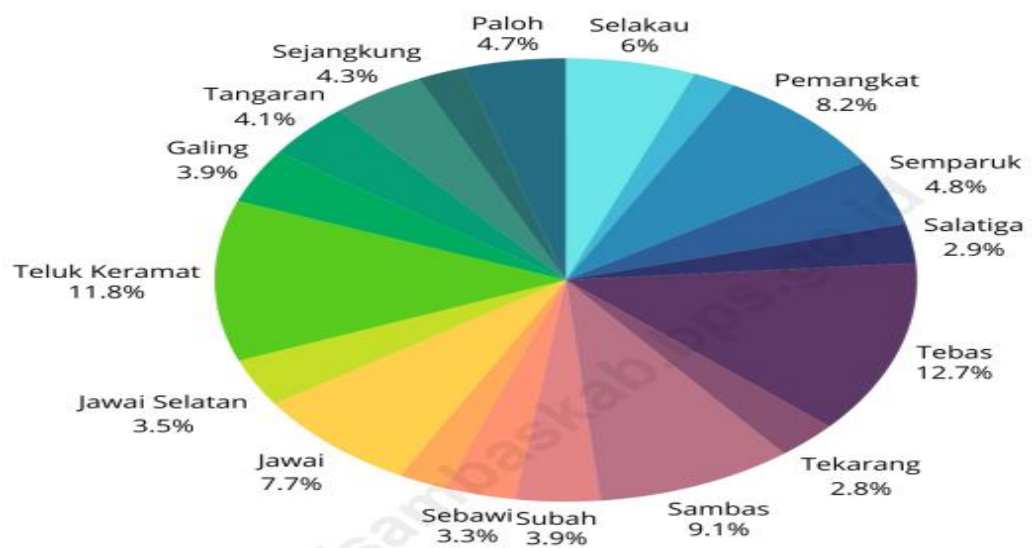
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59%, dan luas wilayah dengan kelerengan 15% - 40% adalah 160.396 hektar atau 25,08%, sedangkan kelas lereng > 40% seluas 46.832 hektar atau 7,3%. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 mdpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 mdpl yaitu di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

1.2.3. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, seperti yang tercantum dalam Program Pembangunan Nasional bahwa manusia Indonesia atau penduduk disebut sebagai modal dasar di samping modal dasar lainnya, apabila mereka dapat dibina dan dikerahkan secara efektif. Namun penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak berkualitas, baik kualitas Pendidikan, Kesehatan, mental dan fisik.

Grafik 2

Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2025



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026



Berdasarkan data dari Katalog Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026, jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2025 berjumlah sekitar 661.452 ribu jiwa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2021-2025
1	Selakau	39.502	0,96
2	Selakau Timur	12.921	0,73
3	Pemangkat	54.259	0,63
4	Semparuk	31.676	1,13
5	Salatiga	19.068	1,01
6	Tebas	84.000	1,04
7	Tekarang	18.759	1,49
8	Sambas	60.235	1,26
9	Subah	25.746	1,30
10	Sebawi	21.483	1,28
11	Sajad	14.870	2,45
12	Jawai	51.152	1,68
13	Jawai Selatan	23.139	0,70
14	Teluk Keramat	77.706	1,02
15	Galing	26.054	1,09
16	Tangaran	26.842	0,89
17	Sejangkung	28.508	0,69
18	Sajingan Besar	14.361	0,90
19	Paloh	31.171	0,77
Kabupaten Sambas		661.452	1,08

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026



Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Sambas Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	29.062	27.866	56.928
5 - 9	28.678	27.057	55.735
11 - 14	28.576	27.460	56.036
15 - 19	29.035	27.153	56.188
20 - 24	27.074	26.015	53.089
25 - 29	25.373	24.405	49.778
30 - 34	24.513	22.867	47.380
35 - 39	25.533	22.867	48.400
40 - 44	25.904	23.515	49.419
45 - 49	23.473	22.240	45.713
50 - 54	20.761	19.731	40.492
55 - 59	16.000	15.244	31.244
60 - 64	12.159	12.673	24.832
65 - 69	9.158	10.579	19.737
70 - 74	6.562	7.636	14.198
75+	5.057	7.226	12.283
Kabupaten Sambas	336.918	324.534	661.452

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2026

1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah membentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) orang Asisten yaitu:



- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Bagian Hukum.
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Bagian Perekonomian;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi dan mengoordinasikan 4 (empat) bagian yaitu:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sambas
- c. Inspektorat Kabupaten
- d. Dinas-Dinas Daerah.
- Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 17 (tujuh belas) dinas yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8) Dinas Sosial;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10) Dinas Perhubungan;



- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- 14) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- 16) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 17) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- 18) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan Daerah

Badan – badan Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 4 (empat) badan yang terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah;
- 3) Badan Keuangan Daerah;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;

f. Kecamatan-Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai 19 (sembilan belas) Kecamatan yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Selakau;
- 2) Kecamatan Pemangkat;
- 3) Kecamatan Jawai;
- 4) Kecamatan Tebas;
- 5) Kecamatan Sambas;
- 6) Kecamatan Sejangkung;
- 7) Kecamatan Teluk Keramat;
- 8) Kecamatan Paloh;
- 9) Kecamatan Sajingan Besar;
- 10) Kecamatan Galing;
- 11) Kecamatan Subah;



- 12) Kecamatan Tekarang;
- 13) Kecamatan Semparuk;
- 14) Kecamatan Sebawi;
- 15) Kecamatan Sajad;
- 16) Kecamatan Jawai Selatan;
- 17) Kecamatan Tangaran;
- 18) Kecamatan Selakau Timur; dan
- 19) Kecamatan Salatiga.

1.2.5. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan ASN sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang)
Tahun 2023-2025 (Keadaan Bulan Desember 2025)

Golongan Ruang	Tahun								
	2023			2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Golongan I	8	3	11	6	0	6	5	0	5
Golongan II	282	203	485	229	171	400	244	211	455
Golongan III	1.541	2.051	3.592	1.468	1.995	3.463	1.435	1.991	3.426
Golongan IV	596	501	1.097	494	399	893	409	357	766
Jumlah	2.427	2.758	5.185	2.197	2.565	4.762	2.093	2.559	4.652

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2025



Tabel 4
Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang)
Tahun 2023-2025 (Keadaan Bulan Desember 2025)

Golongan Ruang	Tahun								
	2023			2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Golongan V	16	5	21	16	5	21	35	16	51
Golongan VI	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Golongan VII	22	49	71	22	49	71	31	64	95
Golongan VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IX	313	589	902	312	586	898	384	752	1.136
Golongan X	6	7	13	6	7	13	7	9	16
Paruh Waktu	0	0	0	0	0	0	1.307	1.925	3.232
Jumlah	357	651	1.008	356	648	1.004	1.764	2.767	4.531

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang)
Tahun 2022-2025

Tingkat Pendidikan	Tahun									
	2023			2024			2025			
	PNS	PPPK	TOTAL	PNS	PPPK	TOTAL	PNS	PPPK	PPPK PW	TOTAL
SD	9	0	9	8	0	8	6	0	24	30
SLTP	32	0	32	25	0	25	19	0	33	52
SLTA	605	21	626	483	21	504	358	51	738	1.147
D-I	14	0	14	6	0	6	2	0	0	2
D-II	208	1	209	120	1	121	52	1	0	53
D-III	863	71	934	812	71	883	840	95	588	1.523
D-IV	144	4	148	163	4	167	216	5	101	322
S-1	3.054	911	3.965	2.890	907	3.797	2.852	1.147	1.748	5.747
S-2	251	0	251	249	0	249	298	0	0	298
S-3	5	0	5	6	0	6	9	0	0	9
Jumlah	5.185	1.008	6.193	4.762	1.004	5.766	4.652	1.299	3.232	9.183

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2025

1.2.6. Sumber Daya Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau



pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

Tabel 6
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	2.127.127.010.802,00	2.079.151.294.230,23	47.975.716.571,77	97,74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.503.974.584,00	301.165.389.545,23	24.338.585.038,77	92,52
4.1.01	PAJAK DAERAH	111.437.914.476,00	88.209.658.712,45	23.228.255.763,55	79,15
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	175.176.555.044,00	175.949.254.940,30	(772.699.896,30)	100,44
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.885.787.658,00	3.885.787.658,00	0,00	100,00
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	35.003.717.406,00	33.120.688.234,48	1.883.029.171,52	94,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.801.623.036.218,00	1.777.985.904.685,00	23.637.131.533,00	98,68
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.718.993.009.000,00	1.687.122.144.040,00	31.870.864.960,00	98,14
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	DANA DESA	190.079.574.000,00	175.817.094.548,00	14.262.479.452,00	92,49
4.2.01.07	DANA BAGI HASIL	36.843.147.000,00	31.667.250.900,00	5.175.896.100,00	85,95
4.2.01.08	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.093.934.964.000,00	1.060.361.524.323,00	3.573.439.677,00	99,67
4.2.01.09	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	398.135.324.000,00	389.276.274.269,00	8.859.049.731,00	97,77
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	82.630.027.218,00	90.863.760.645,00	(8.233.733.427,00)	109,96
4.2.02.01	PENDAPATAN BAGI HASIL	77.140.027.218,00	86.917.689.204,00	(9.777.661.986,00)	112,67
4.2.02.02	BANTUAN KEUANGAN	5.490.000.000,00	3.946.071.441,00	1.543.928.559,00	71,87
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BELANJA	2.209.760.872.279,00	2.051.613.745.022,56	158.147.127.256,44	92,84
5.1	BELANJA OPERASI	1.535.033.525.024,00	1.435.107.766.874,56	99.925.758.149,44	93,49
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	696.700.882.046,00	678.279.921.839,35	18.420.960.206,65	97,35
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	703.642.268.729,00	659.053.677.953,00	44.588.590.775,50	93,66
5.1.03	BELANJA BUNGA	2.875.000.000,00	2.592.913.076,71	282.086.923,29	90,18
5.1.05	BELANJA HIBAH	131.005.174.249,00	94.597.254.005,00	36.407.920.244,00	72,20
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	810.200.000,00	584.000.000,00	226.200.000,00	72,08
5.2	BELANJA MODAL	363.976.413.899,00	320.242.761.064,00	43.733.652.835,00	87,98
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	903.200.000,00	897.921.000,00	5.279.000,00	99,41
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	57.776.265.092,00	55.745.260.519,00	2.031.004.573,00	96,48
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.258.251.852,00	97.956.962.554,00	2.301.289.298,00	97,70



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	190.594.712.055,00	151.237.227.711,00	39.357.484.344,00	79,35
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	14.443.984.900,00	14.405.389.280,00	38.595.620,00	99,73
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	325.000.000,00	99.763.180,00	225.236.820,00	30,69
5.4	BELANJA TRANSFER	310.425.933.356,00	296.163.453.904,00	14.262.479.452,00	95,40
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	7.273.069.956,00	7.273.069.956,00	0,00	100,00
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	303.152.863.400,00	288.890.383.948,00	14.262.479.452,00	95,29
	JUMLAH BELANJA	2.209.760.872.279,00	2.051.613.745.022,56	158.147.127.256,44	92,84
	SURPLUS (DEFISIT)	(82.633.861.477,00)	27.537.549.207,67		(33,32)
6	PEMBIAYAAN	82.633.861.477,00	(13.951.661.790,67)		(16,88)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.233.861.477,00	134.648.338.209,22		58,23
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	7.155.338.209,00	7.115.338.209,33		100,00
6.1.04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	224.118.523.268,00	127.533.000.000,00		56,90
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.233.861.477,00	134.648.338.209,33		58,23
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	148.600.000.000,00	148.600.000.000,00		0,00
6.2.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00		0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	148.600.000.000,00	148.600.000.000,00	232.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.633.861.477,00	(13.951.661.790,67)		(16,88)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	13.585.887.417,00	(4.587.792.740,67)	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, adapun permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Sambas ke depan masih dihadapkan pada kondisi sebagai berikut :



1. **Laju pertumbuhan ekonomi** yang mulai meningkat namun masih dibayangi oleh dampak negatif pandemi covid 19, ancaman resesi global dan perubahan iklim.
2. Masih **rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap** sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
3. **Tingkat pengangguran terbuka** yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
4. **Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan** masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
5. Indeks Pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada **kondisi rendahnya rangka Rata-Rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup**.
6. Prevalensi stunting yang sudah mulai menurun namun masih berada pada **zona merah stunting** di Kalimantan Barat.
7. Masih tingginya **potensi terjadinya kerusakan lingkungan** akibat aktivitas Pembangunan, aktivitas Masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
8. Masih **tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah** terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim.
9. **Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik**.
10. Belum optimalnya pembangunan di **kawasan perbatasan** sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah **“Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Sambas Berkemajuan yang Terunggul di Kalimantan Barat”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Penguatan Transformasi Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial);



2. Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Ekonomi (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Unggulan, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Iptek dan Inovasi serta Optimalisasi Wilayah Perbatasan);
3. Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui Transformasi Tata Kelola (Optimasi Regulasi, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik dan Pelaksanaan SPBE yang Berintegritas serta Adaptif).



2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kab. Sambas

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sambas masih menggunakan rencana strategis yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Sambas Tahun 2025. Sedangkan untuk RPJMD 2025-2029 akan efektif dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sambas Nomor 528/SETDA-OR/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030. Adapun rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, jargon yang digunakan adalah **“Sambas Baru, Berkemajuan”**, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari :

- **Ber** = Beriman kepada Allah SWT
- **Ke** = Kemandirian
- **Maju** = Maju
- **An** = Berkelanjutan

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas H. Satono, S.Sos., I.M.H. dan Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. adalah :

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”



Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a. **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman dan bertakwa kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean government*).
- b. **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sector industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- c. **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
- d. **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjadi fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam



kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good and clean government*) dan berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil menengah, koperasi dan industri;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.



2.1.3. Tujuan:

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya;
3. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah;
5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah;
6. Meningkatnya status kemajuan desa;
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Meningkatnya kesempatan kerja;
9. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
10. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;



8. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah;
9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif dan berdaya saing;
11. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS;
12. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan;
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
14. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.5. Strategi

Untuk mencapai visi dan misi yang telah disampaikan di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - b. Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan; dan
 - c. Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sector kehidupan bermasyarakat;
 - d. Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal;
 - e. Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - f. Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
 - g. Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
 - h. Peningkatan tata kelola kearsipan;



- i. Peningkatan kualitas statistik daerah;
 - j. Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - k. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - m. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan;
 - n. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
 - o. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - p. Peningkatan persandian;
 - q. Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
 - r. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - s. Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.
- a. Peningkatan rasio kewirausahaan;
 - b. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
 - c. Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
 - d. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;
 - e. Peningkatan kunjungan wisata;
 - f. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
 - g. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
 - h. Peningkatan ketersediaan pangan;



- i. Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
 - j. Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
 - k. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - l. Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - m. Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
 - n. Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;
 - o. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - p. Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi.
3. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - a. Peningkatan perlindungan terhadap anak;
 - b. Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
 - c. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d. Peningkatan pembinaan pemuda;
 - e. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
 - f. Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - g. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
 - h. Peningkatan pembinaan olah raga; dan
 - i. Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
4. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - a. Peningkatan kesempatan kerja.
5. Strategi untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Peningkatan kualitas lahan;
 - b. Peningkatan kualitas air;



- c. Peningkatan kualitas udara;
- d. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang;
- e. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana.

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan:
 - a. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
 - b. Meningkatkan pembinaan penyuluh agama, tokoh agama, guru ngaji, amil dan lebai, kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum terpadu serta pembinaan kepada masyarakat dan kelompok keluarga sadar hukum;
 - d. Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkara;
 - e. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat;
 - g. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - h. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - i. Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
 - j. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan;



- k. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
 - n. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah;
 - o. Meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-government;
 - p. Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
 - q. Meningkatkan kualitas statistic daerah;
 - r. Meningkatkan persandian;
 - s. Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip;
 - t. Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbang dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah;
 - u. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban dan pelayanan public;
 - v. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - w. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - x. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi:
- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor;
 - c. Peningkatan pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 - d. Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;



- e. Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Meningkatkan produksi di sektor peternakan;
 - h. Meningkatkan daya Tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi;
 - j. Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha;
 - k. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi;
 - l. Meningkatkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha;
 - m. Meningkatkan rasio eirausaha berskala mikro naik kelas;
 - n. Meningkatkan ketersediaan pangan;
 - o. Meningkatkan jalan poros kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
 - p. Meningkatkan penataan bangunan Gedung dan lingkungannya;
 - q. Meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - r. Meningkatkan konektivitas, ketertiban dan keamanan di sektor perhubungan;
 - s. Meningkatkan rumah tangga pengguna air minum yang layak;
 - t. Meningkatkan rumah tangga bersanitasi yang layak;
 - u. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - v. Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman; dan
 - w. Meningkatkan penataan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia:
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses Pendidikan;
 - c. Meningkatkan Kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan sarpras Kesehatan;
 - e. Meningkatkan budaya literasi masyarakat;



- f. Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda;
 - g. Meningkatkan pembinaan olahraga;
 - h. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan;
 - i. Meningkatkan kualitas keluarga;
 - j. Meningkatkan perlindungan terhadap anak;
 - k. Meningkatkan pengendalian penduduk;
 - l. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan
 - m. Meningkatkan pemberdayaan sosial.
4. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja:
- a. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja; dan
 - b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
5. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas air;
 - b. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan;
 - c. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas udara;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas;
 - e. Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran; dan
 - f. Meningkatkan penataan ruang dalam pembangunan daerah.

2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan					
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	1.	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	1.	Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal.
2.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sektor kehidupan bermasyarakat;
				3.	Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
				4.	Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan;
3.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	5.	Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
				6.	Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD;
				7.	Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
				8.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
				9.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
				10.	Peningkatan kualitas pelayanan public di bidang adminduk;
				11.	Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
				12.	Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
				13.	Peningkatan kualitas statistic daerah;
				14.	Peningkatan persandian;
				15.	Peningkatan tata kelola kearsipan;



				16.	Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
				17.	Peningkatan kualitas pelayanan public di kecamatan;
		4.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.	18.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan; dan
				19.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misi 2 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.					
4.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1.	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	1.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
				2.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
				3.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
				4.	Peningkatan kunjungan wisata;
				5.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;
				6.	Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
				7.	Peningkatan rasio kewirausahaan;
		2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	8.	Peningkatan ketersediaan pangan;
5.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	3.	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	9.	Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
				10.	Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
				11.	Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
				12.	Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
				13.	Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;
				14.	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
6.	Meningkatnya status kemajuan desa	4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	15.	Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi;
				16.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia					



7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif	1.	Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
				2.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
				3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
				4.	Peningkatan pembinaan pemuda;
				5.	Peningkatan pembinaan olah raga;
				6.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
				7.	Peningkatan perlindungan terhadap anak;
				8.	Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
		2.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	9.	Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
Misi 4 :		Meningkatkan pmdapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.			
8.	Meningkatnya kesempatan kerja	1.	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan	1.	Peningkatan kesempatan kerja
Misi 5 :		Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.			
9.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Peningkatan kualitas air;
				2.	Peningkatan kualitas udara;
				3.	Peningkatan kualitas lahan;
10.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	2.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	4.	Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana;
				5.	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,1
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.80
		Indeks Gini	0.265
4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8
5.	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	150,13
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap	75,15
7.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP	BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
8.	Meningkatnya Status Kemajuan Desa	Jumlah Desa Mandiri	195
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,65

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.631.483.778.214,00.



3.1 Capaian Kinerja pemerintah kab. Sambas

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2026 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sambas Nomor 818/SETDA-OR/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 1026/SETDA-OR/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2022-2206. Untuk itu, pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 menggambarkan capaian akhir RPJMD Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan.

Tingkat pencapaian indikator kinerja Tahun 2025, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Indikator	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1	Pertumbuhan ekonomi	89,43	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	2	Indek Pembangunan Manusia	100,45	Tercapai
3	Menurunnya angka kemiskinan	3	Angka Kemiskinan	106,75	Tercapai
		4	Indeks Gini	87,37	Tidak Tercapai
4	Menurunnya tingkat pengangguran	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	99,80	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	6	Indeks Resiko Bencana	136,83	Tercapai
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur	7	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	112,57	Tercapai
7	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	8	Indeks Reformasi Birokrasi	112,57	Tercapai
		9	Nilai SAKIP	91,99	Tidak Tercapai
		10	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	N/A



8	Meningkatnya Status Kemajuan Desa	11	Jumlah Desa Mandiri	97,44	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	93,45	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Sambas dengan 9 (sembilan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator, menunjukkan bahwa **5 (lima) indikator kinerja dengan kategori Tercapai, 6 (enam) indikator kinerja dengan kategori Tidak Tercapai, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori N/A.**

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian setiap indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1: “Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah”

“Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi *“Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi”*. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu *“Pertumbuhan Ekonomi”*.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,3	4,74	89,43%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 5,3 persen dengan realisasi sebesar 4,74 persen dengan capaian 89,43 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,8	4,74	98,75%	5,3	4,74	89,43%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas tahun 2025 tetap dengan capaian yang sama dengan tahun 2024 sebesar 4,74 persen namun mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 9,32 dari tahun 2024.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4,69	4,74	4,74

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi telah meningkat sebesar 0,10 persen. pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas adalah 4,64 dan pada tahun 2025 mencapai 4,74 mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,74	5,03	5,3-5,7

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 baru mencapai 94,23 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas masih lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,4-6,0 persen. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11 persen.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 1, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30.966 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp 43,82 juta. Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen, tumbuh tetap dengan capaian yang sama dengan tahun 2024. Dari sisi produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,70 persen. Sementara dari sisi pengeluaran komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut :

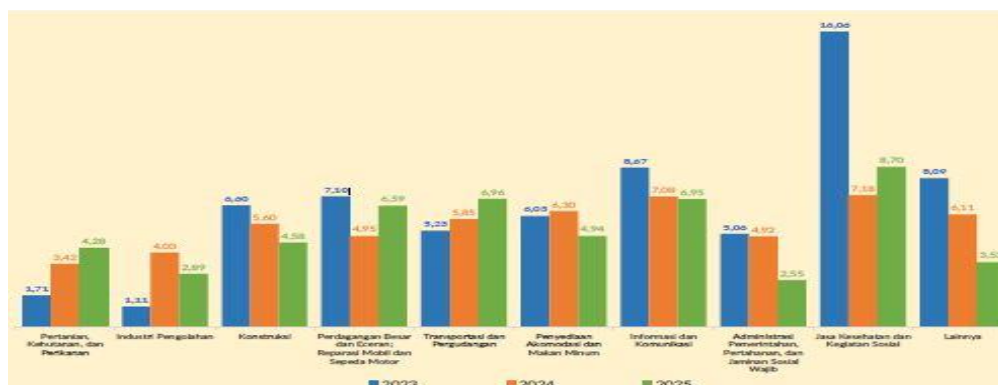
a) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,70 persen; Jasa Lainnya sebesar 8,51 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,96



persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,95 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,59 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,04 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,28 persen.

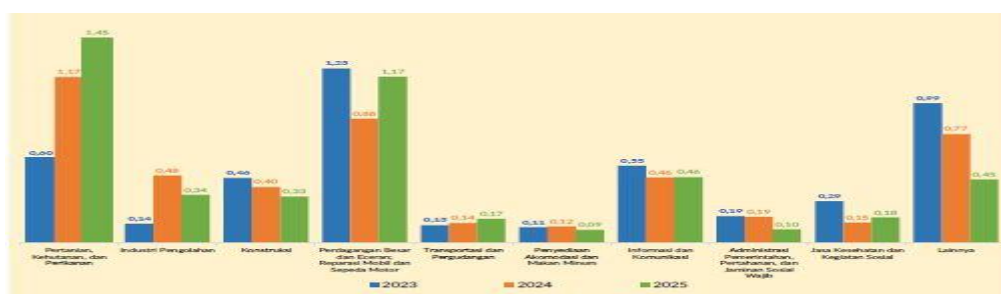
Grafik 3
Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan usaha Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Bila dicermati lebih lanjut dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2025, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,45 persen, diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 1,17 persen, Lapangan usaha Informasidan Komunikasi sebesar 0,46 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,34 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya sebesar 0,45 persen.

Grafik 4
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan usaha Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025



Struktur PDRB Kabupaten Sambas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 mengalami sedikit perubahan komposisi masing-masing sektor lapangan usaha, namun tidak terdapat perubahan signifikan yang menggeser posisi distribusi secara keseluruhan. Komposisi terbesar masih dimiliki oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami sedikit perubahan 32,56 persen pada tahun 2024 menjadi 33,07 persen pada tahun 2025. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap memiliki peranan terbesar kedua dengan distribusi sebesar 17,86 persen di tahun 2025, tidak berbeda jauh dari tahun 2024 sebesar 17,87 persen. Selanjutnya sektor Industri Pengolahan yang memiliki distribusi sebesar 11,57 persen pada tahun 2024 sedikit mengalami perubahan menjadi sebesar 11,88 persen pada tahun 2025. Selain ketiga sektor tersebut, lapangan usaha lainnya memiliki distribusi masing-masing dibawah 9 persen dengan urutan sektor Konstruksi sebesar 8,62 persen; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,84 persen; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 4,30 persen; sektor Jasa Pendidikan sebesar 4,03 persen; sektor Real Estat sebesar 3,08 persen; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,53 persen; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,28 persen; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,12 persen; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,93 persen; sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 1,18 persen; serta sektor-sektor lainnya yang masing-masing memiliki distribusi kurang dari 1 persen.

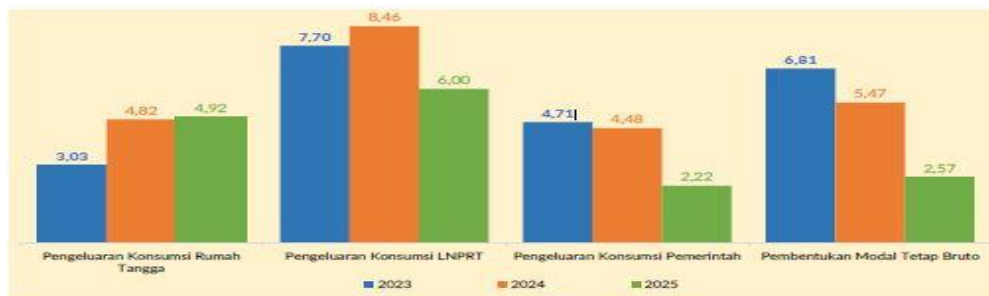
b) PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,92 persen, pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 6,00 persen, pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 2,22 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 2,57



persen. Secara total perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Jika dicermati berdasarkan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Sambas 2025, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan sebesar 0,64 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,19 persen. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,08 persen.

Grafik 6
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Sambas menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 sedikit mengalami perubahan komposisi namun tidak merubah posisi distribusi Komponen Pengeluaran secara keseluruhan. Perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 51,31 persen, diikuti



oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 24,69 persen, Net ekspor Barang dan Jasa 14,25 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,21 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,13 persen, dan Perubahan Inventori sebesar 0,41 Persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur dan Jalan Usaha Tani melalui pembangunan jalan, jembatan, dan jalan usaha tani untuk memudahkan akses logistik dan meningkatkan produktivitas petani.
- Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui sinergi dengan Kementerian UMKM untuk pelatihan, pendanaan, dan fasilitasi akses pasar digital, termasuk membangun sentra UMKM.
- Swasembada Pangan dan Pertanian dengan mengoptimalikan komoditas prioritas seperti padi dan jeruk, serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan, khususnya di wilayah perbatasan.
- Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Perbatasan dengan mengadakan pasar murah dan mempercepat pembangunan pelabuhan ekspor-impor di wilayah perbatasan. Selain itu melakukan kegiatan pangan murah untuk menjadi stabilitas ekonomi rakyat.
- Pengembangan SDM dan Investasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta memfasilitasi investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah	33 Program	89,43	68,23	21,20

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 1 (satu) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 33 (tiga puluh tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 65.508.931.547,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 45.376.315.986,00 atau 68,23 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 89,43 persen dan Persentase realisasi anggaran sebesar 68,23 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 21,20 persen.

SASARAN 2:

“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”

“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”* Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu *“Indek Pembangunan Manusia”*.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71,76	72,08	100,45%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator IPM Kabupaten Sambas tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 71,76 dengan realisasi sebesar 72,08 dengan capaian 100,45 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	71.20	100,28%	71,76	72,08	100,45%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten sambas tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,88 poin dibanding Tahun 2024.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,88	70,60	71.20	72,08

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa IPM kabupaten sambas terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, IPM telah meningkat sebesar 2,2 poin atau rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Sambas adalah 69,88 dan pada tahun 2025 mencapai 72,08 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2
dengan Target Akhir RPJMD dan Capaian Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
1.	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	72,08	70,39	75,90

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja IPM Kabupaten Sambas pada tahun 2025 telah mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi sebesar 102,40 persen. Sedangkan capaian IPM Kabupaten Sambas masih dibawah capaian nasional yaitu 75,90 atau 94,97 persen.

Analisis keberhasilan Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 2, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2025 mencapai 72,08, meningkat 0,88 poin (1,24 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,20). Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

a) Dimensi umur Panjang dan hidup sehat

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,80 tahun, lebih lama 0,48 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

b) Dimensi pengetahuan

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,76 menjadi 12,77 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,24 tahun, dari 6,76 tahun menjadi 7,00 tahun pada tahun 2025. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret 2025.

c) Dimensi standar hidup layak

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), meningkat 401 ribu rupiah (3,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan IPM Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :



- a) Peningkatan akses kesehatan dengan fokus pada penyediaan dan perbaikan infrastruktur kesehatan agar lebih mudah diakses oleh Masyarakat di seluruh pelosok sambas.
- b) Peningkatan kualitas kesehatan sebagai bagian dari prioritas Pembangunan untuk memacu kualitas hidup bagi yang tidak mampu melalui program “Prosesar”
- c) Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan lama Sekolah (HLS) yang sebelumnya masih menjadi tantangan.
- d) Pemberdayaan SDM dengan mendorong partisipasi Masyarakat dan relawan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di tingkat lokal.
- e) Memberikan apresiasi tinggi kepada guru untuk memotivasi peningkatan mutu pengajaran.
- f) Melakukan Pembangunan infrastruktur yang masif untuk mendukung perekonomian rakyat dan mempermudah akses ekonomi. Program pemberdayaan melalui program 4P (Pemberdayaan Perempuan Sambas) dan inisiatif lain yang mendorong sektor ekonomi mikro dan kecil.
- g) Penyajian data berbasis IT dengan menggunakan infografi dan media sosial untuk mempublikasikan data IPM agar transparan dan mudah di akses, serta merumuskan kebijakan berbasis data (data-driven-policy).
- h) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sambas, Stakeholder terkait dan partisipasi aktif masyarakat.
- i) Program pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan peningkatan IPM diintegrasikan dalam rencana Pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan program yang menunjang keberhasilan pada sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Program	100,45	96,92	3,53

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 2 (dua) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 18 (delapan belas) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 568.333.158.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 550.830.021.438.07 atau 96,92 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,45 dan Persentase realisasi anggaran sebesar 96,92 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,53 persen.

SASARAN 3: **“Menurunnya Angka Kemiskinan”**

“Menurunnya Angka Kemiskinan” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu angka kemiskinan dan indeks gini.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	-	6.80	6.37	106,75%
2.	Indeks Gini	-	0.265	0,293	87,37%
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3					97,06%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat nilai 6,37 dengan capaian kinerja 106,75 persen dan dikategorikan tercapai. Sedangkan untuk indeks gini kabupaten sambas tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat nilai 0,293 dengan capaian kinerja 87,37 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Angka Kemiskinan	6.94	6.53	106,28%	6.80	6,37	106,75%
2.	Indeks Gini	0.270	0.248	108,87%	0.268	0,293	87,37%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Sambas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dari tahun 2024. Sedangkan untuk capaian indeks gini Kabupaten Sambas tahun 2025 peningkatan nilai dari tahun sebesar 0,045 point .

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Angka Kemiskinan	6.92	7,08	6.53	6.37
2.	Indeks Gini	0,256	0.270	0.248	0,293

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat angka kemiskinan Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 angka kemiskinan mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2024 dan 2025. Selama periode 2022 hingga 2025 angka kemiskinan telah menurun sebesar 0,25 poin. Sedangkan untuk capaian indeks gini Kabupaten Sambas juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 indeks gini mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025. Selama periode 2022 hingga 2025 indeks gini meningkat sebesar 0,037 poin.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3
dengan Target Akhir RPJMD dan Capaian Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
1.	Angka Kemiskinan	6,37	6,44	8,47
2	Indeks Gini	0,293	0.267	0,375

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja angka kemiskinan tahun 2025 telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian kinerja sebesar 101,10 persen. Sedangkan indeks gini tahun 2025 baru mencapai 91,13 persen dari target akhir RPJMD.

Analisis keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 3, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sambas pada tahun 2025 sebesar 6,37 persen, turun 0,16 persen poin terhadap tahun 2024. Artinya, terdapat 6,37 persen penduduk Kabupaten Sambas yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas pada tahun 2025 mencapai 35,07 ribu orang, mengalami penurunan 2,23 persen dibandingkan tahun 2024.



Angka kemiskinan di Kabupaten Sambas yang telah mencapai satu digit merupakan tantangan tersendiri atau biasa disebut dengan istilah *Last Mile Problem*. Angka tersebut akan cenderung mengalami fluktuasi. Pada kondisi ini penduduk miskin merupakan kelompok “kerak kemiskinan” dengan beragam karakteristik diantaranya kepemilikan aset yang rendah, pendidikan yang rendah, angka ketergantungan dalam rumah tangga tinggi, kondisi kesehatan yang rentan, kualitas sumberdaya manusia yang tidak kompetitif, dan karakteristik pekerjaan yang tidak produktif

Jika lihat dari garis kemiskinan di Kabupaten Sambas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp542.366,- per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 2,72 persen. Sedangkan Pada tahun 2024–tahun 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sambas mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sambas pada tahun 2025 sebesar 0,72, turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,85. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,19 menjadi 0,12.

Beberapa faktor/fenomena yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Sambas selama tahun 2024 antara lain adalah :

- a) Sebagian besar wilayah mengadakan sya’banan (tradisi acara makan bersama yang dilakukan di rumah-rumah) yang menyebabkan peningkatan konsumsi makanan jadi yang signifikan. Frekuensi dan intensitas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas sya’banan ini juga meningkatkan transaksi jual-beli di pasar tradisional.
- b) Harga jual di level petani untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet di sebagian besar Kecamatan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2025.
- c) Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) pada triwulan 1 tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen, meningkat dibandingkan laju pertumbuhan PKRT triwulan 1 tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,77 persen.



- d) Luas panen padi pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 25.023 hektar dengan produksi sebesar 84.255 ton, naik dibandingkan produksi triwulan 1 tahun 2024 sebesar 76.271 ton dengan luas panen sebesar 25.048 hektar.
- e) Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 169,67. NTP diatas 100 menunjukkan harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayar oleh petani.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sambas antara lain :

- a) Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi pertanian, Perkebunan dan UMKM.
- b) Optimalisasi sektor pertanian (swasembada pangan).
- c) Melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, termasuk rencana Pembangunan “sekolah rakyat” untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
- d) Melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai pendekatan kolaboratif untuk membantu Masyarakat miskin di bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran.

2. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Indeks Gini Kabupaten Sambas tahun 2024 sebesar 0,256 dan menurun 0,014 poin dibanding tahun 2023 sebesar 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas mengalami tren positif dengan ketimpangan pengeluaran yang lebih rendah, mencerminkan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan pada tahun 2025 Indeks gini ratio Kabupaten Sambas masih belum di rilis oleh BPS.

Pada Tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sambas mencapai Rp 11,939 juta per tahun. Capaian ini meningkat 401 ribu rupiah (3,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini masih cukup tinggi walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,35 persen. bila dilihat dari (meningkat 481 ribu rupiah). Bila dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sambas mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sambas pada tahun 2025 sebesar 0,72, turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,85. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,19 menjadi 0,12.

Selain itu, indeks gini dipengaruhi oleh tingkat perlindungan sosial yaitu tingkat jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial. Perlindungan sosial juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Perlindungan sosial dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan pendapatan dasar, bantuan sosial, bantuan tunai, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan permakanan, bantuan lansia dan penyandang disabilitas. pada Tahun 2025 terdapat 225.870 jiwa yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sebanyak 21.256 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah mendapat bantuan kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja indeks gini antara lain :



- a) Peningkatan Sektor Pertanian & Hortikultura dengan mengoptimalkan status Sambas sebagai lumbung padi Kalbar dan sentra hortikultura (cabai, melon, buah naga) untuk meningkatkan pendapatan petani.
- b) Penguatan IPM dengan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang secara langsung berpengaruh pada penurunan gini rasio.
- c) Pengurangan Kemiskinan melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran, mengingat tingginya gini ratio berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
- d) Pemerataan Infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Bupati Sambas telah membuat program **"Pembangunan Jembatan Berkemajuan"** yang dibangun menggunakan Non APBD sebagai komitmen pemerataan Pembangunan di Kabupaten Sambas.
- e) Penciptaan Lapangan Kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran untuk menaikkan pendapatan riil penduduk, khususnya di sektor ekonomi produktif.
- f) Optimalisasi Investasi dengan mengarahkan investasi, baik pemerintah maupun swasta, ke sektor-sektor yang melibatkan ekonomi masyarakat luas Pemerintah Kabupaten Sambas.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menurunnya angka kemiskinan	6 Program	N/A	98,09	N/A

Sumber : Baperda kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja pada sasaran 3 (tiga) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas, dengan anggaran sebesar Rp. 894.447.326,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 877.333.652,00 atau 98,09 persen dari yang telah dianggarkan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 masih belum bisa diukur dikarenakan capaian kinerja indeks gini masih belum rilis BPS.

SASARAN 4: “Menurunnya Tingkat Pengangguran ”

“Menurunnya tingkat pengangguran” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 25
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	4,9	4,91	99,80

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 4,9 persen dengan realisasi sebesar 4,91 persen dengan capaian 99.80 persen dan dikategorikan tidak tercapai.



Tabel 26
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0	4,99	100,20%	4,9	4,91	99,80%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas Tahun 2025 mengalami penurunan realisasi sebesar 0,08 persen dibanding Tahun 2024, namun mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 0,20 persen.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	5,04	4,99	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, TPT telah mengalami penurunan sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2022. TPT Kabupaten Sambas adalah 5,08 dan pada tahun 2025 mencapai 4,91 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91	2,60	4,85

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas pada Tahun 2025 baru mencapai 52,95 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas masih dibawah capaian nasional yaitu 4,85 atau 98,78 persen.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 4, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kabupaten Sambas adalah sebesar 4,91 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada tahun 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Tahun 2024.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten Sambas tahun 2025 dipengaruhi oleh penduduk usia kerja dan angkatan kerja, karakteristik penduduk yang bekerja dan karakteristik penganggur. Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sambas. Penduduk usia kerja pada tahun 2025 sebanyak 493,92 ribu orang, naik sebanyak 6,74 ribu orang dibanding tahun 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 361,03 ribu orang (73,09 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 132,89 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK pada tahun 2025 sebesar 73,09 persen, naik 0,31 persen poin dibanding tahun 2024. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,35 persen, yaitu lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 61,45 persen. Apabila dibandingkan tahun 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sementara TPAK perempuan mengalami kenaikan.



Karakteristik penduduk yang bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian sebesar 45,97 persen; selanjutnya adalah sektor Jasa-jasa sebesar 39,89 persen, dan sektor Manufaktur sebesar 14,14 persen. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan tahun 2024 adalah sektor Jasa-jasa (5,51 persen poin). Sektor Manufaktur juga mengalami peningkatan sebesar 3,10 persen poin. Sementara itu sektor Pertanian mengalami penurunan 8,61 persen poin dibandingkan tahun 2024.

Pada tahun 2025, penduduk bekerja di Kabupaten Sambas paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai yaitu sebesar 30,45 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 3,83 persen. Dibandingkan tahun 2024, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap (5,89 persen poin) dan pekerja keluarga/tidak dibayar (2,86 persen poin). Selain itu, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 117,66 ribu orang (34,27 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 225,65 ribu orang (65,73 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada tahun 2025 meningkat sebesar 2,78 persen poin jika dibandingkan tahun 2024.

TPT Menurut jenis kelamin Pada tahun 2025, TPT laki-laki sebesar 6,67 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,41 persen. Dibandingkan tahun 2024, TPT laki-laki naik sebesar 1,51 persen poin dan TPT perempuan turun sebesar 2,33 persen poin. Sedangkan TPT menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2025, TPT dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 14,04 persen. Dibandingkan tahun 2024, penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah SMP, dan SMA. Sebaliknya, TPT pada kategori pendidikan SMK dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Penurunan



TPT terbesar terjadi pada kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 2,63 persen poin, sedangkan kategori yang mengalami kenaikan terbesar terdapat pada kategori SMK sebesar 8,63 persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja tingkat pengangguran terbuka antara lain :

- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal melalui program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sambas yaitu Program “**Pemuda Siap Kerja**”.
- Pengembangan sektor potensial khususnya pada sektor pertanian dan UMKM sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.
- Mendukung pelaksanaan inovasi “SAMBAS PROGRESIF” (Produktif, *Great Job*, *Skiled*, Kompetitif) sebagai strategi untuk meningkatkan produktifitas dan keahlian tenaga kerja.
- Mempermudah akses perijinan pada sektor UMKM agar dapat membuka peluang usaha bagi Masyarakat.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	4 Program	99,80	99,14	0,66

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 4 (empat) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 2.746.939.739,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.723.182.828,00 atau 99,14 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila



dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,80 dan Persentase realisasi anggaran sebesar 99,14 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,66 persen.

SASARAN 5 “Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana”

“Meningkatnya ketahanan terhadap bencana” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi *“mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”* Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Resiko Bencana (IRB).

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 5 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Resiko Bencana	-	150,13	109,61	136,83%

Sumber: BPPB Kabupaten Sambas Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana telah mencapai target yang ditentukan sebesar 150,13 dengan realisasi sebesar 109,61 dengan capaian 136,83 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 31
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Resiko Bencana	150,72	134,55	112,02%	150,13	109,61	136,83%

Sumber : BPPB Kabupaten Sambas Tahun 2026



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks resiko bencana Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24,94 dibanding tahun 2024 atau peningkatan capaian kinerja sebesar 24,81 persen.

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Resiko Bencana	155,41	155,41	134,55	109,61

Sumber : BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, IRB Kabupaten Sambas mengalami penurunan sebesar 45,80 poin. Pada Tahun 2022, IRB Kabupaten Sambas adalah 155,41 dan pada tahun 2025 mencapai 109,61 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5
dengan Target Akhir RPJMD dan Capaian Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	109,61	139,05	Tidak Ada

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja IRB Kabupaten Sambas pada Tahun 2025 telah mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi sebesar 126,86 persen. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator indeks resiko bencana.

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 5, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Kabupaten Sambas memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama terkait banjir, dengan sekitar 69% wilayah kota (sekitar 15.084,85 Ha) merupakan kawasan rawan banjir tinggi. Tanah alluvial (36,06%) yang dominan di wilayah ini berkontribusi pada kerentanan ini.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang terjadi, sehingga meminimalkan risiko, dampak, dan kerugian akibat bencana, baik berupa korban jiwa, kerusakan fisik, maupun kerugian ekonomi, melalui tindakan struktural dan nonstruktural.

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan IRB Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

a) Penerapan Konsep Berbasis Data (AMPD).

Kabupaten Sambas menjadi yang pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan Rencana Kontingensi Banjir berbasis AMPD, sebuah pendekatan yang mengoptimalkan data untuk memetakan potensi bencana secara akurat.

b) Penyusunan Dokumen Renkon.

Melakukan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir tahun 2026 sebagai panduan terstruktur dalam menghadapi bencana.

c) Melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, antara lain :

- 1) Menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2024-2028 yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Bupati Sambas No. 103 Tahun 2024.
- 2) Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang diturunkan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2019.
- 3) Membentuk POSKO Penanganan Darurat Kebencanaan dan Kerelawanan yang terpusat di BPBD.



- 4) Membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang hingga saat telah terbentuk sebanyak 62 desa yang tersebar di 19 kecamatan.
- 5) Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), hingga saat ini telah diterapkan di tingkat SD sebanyak 5 unit, tingkat SLTP sebanyak 3 unit dan tingkat SLTA sebanyak 5 unit.
- 6) Penerapan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, hingga saat ini telah diterapkan seluruh RS dan Puskesmas.
- 7) Terselenggaranya Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di hampir seluruh desa rawan bencana, terutama daerah rawan banjir dan kebakaran hutan dan lahan serta abrasi Pantai.
- 8) Terselenggaranya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Peduli Bencana atau Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) serta Perusahaan.
- 9) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kabupaten maupun Tim Reaksi Cepat Organik BPBD.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 34
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	3 Program	136,83	87,29	49,54

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 5 (lima) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 4.492.678.144,00 dan telah direalisasikan sebesar



Rp. 3.921.772.104,00 atau 87,29 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 136,83 dan Persentase realisasi anggaran sebesar 87,29 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 49,54 persen.

SASARAN 6 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur”

“Meningkatnya kualitas infrastruktur” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase infrastruktur dalam kondisi mantap.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	-	58,91	59,31	100.68%

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2025 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 58,91 persen dengan realisasi sebesar 59,31 persen dengan capaian 100,68 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada RPJMD 2025-2029.



Tabel 36
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	73,10	74,45	101,85%	58,91	59,31	100.68%

Sumber : Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2025 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 1,17 persen. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada RPJMD 2025-2029, sehingga target tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024.

Tabel 37
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	71,90	72,09	74,45	59,31

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sebesar 2,25 poin. Pada Tahun 2022, Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Sambas adalah 71,90 dan pada tahun 2024 mencapai 74,45 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada RPJMD 2025-2029, sehingga realisasi tahun 2025 lebih rendah.



Tabel 38
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	59,31	65,03	Tidak Ada

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada tahun 2025 baru mencapai 91,20 persen dari target akhir RPJMD 2025-2029. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator persentase infrastruktur dalam kondisi mantap.

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 6, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap

Untuk mengukur capaian kinerja infratraktur dalam kondisi mantap ditentukan dengan capaian beberapa indikator kinerja antara lain :

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 45,71 persen dan dapat terealisasi sebesar 46,44 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,57 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2025 panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 567.271 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 1.102,206 km atau 46,44 persen. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada RENSTRA 2025-2029 pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b) Persentase Jalan poros desa dalam Kondisi mantap

Indikator persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 46,71 persen dan dapat terealisasi sebesar 45,91 persen dengan capaian kinerja sebesar 98,29 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Pada tahun 2025 jalan poros desa dalam



kondisi mantap sepanjang 415,59 km dari panjang seluruh jalan poros desa di Kabupaten Sambas 898,626 km atau 45,91 persen. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

c) Rasio luas daerah irigasi

Rasio luas daerah irigasi tahun 2025 ditargetkan 8,05 persen dan dapat terealisasi sebesar 9,55 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,97 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2025 jaringan irigasi yang telah dibangun sepanjang 2.306.514 m dari seluruh jaringan irigasi yang harus ditangani sepanjang 7.253.187,26. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d) Rasio tersedianya dermaga /steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang

Rasio tersedianya dermaga /steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 69,62 persen dan terealisasi sebesar 68 persen dengan capaian kinerja 97,67 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan dari target 25 unit dermaga/steher yang akan dibangun hanya terealisasi 24 dermaga/steher atau 96 persen.

e) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 43,79 persen dan terealisasi sebesar 44,45 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,51 persen dan dikategorikan tercapai. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2025 sebesar 4.146 RT, jumlah total rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2025 sebanyak 84.432 RT dari total rumah tangga sebanyak 125.981 RT. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target Persentase rumah tangga yang



menempati hunian dengan akses air minum layak pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

f) Persentase rumah tangga bersanitasi.

persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 53,46 persen dan dapat terealisasi sebesar 53,49 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,06 persen dan dikategorikan tercapai. Tercapainya Persentase rumah tangga bersanitasi layak didukung oleh sistem drainase yang layak dengan kondisi pembuangan air tidak tersumbat. Jumlah penduduk yang mendapat drainase yang layak sebanyak 106.129 RT dari total rumah tangga 125.981 RT. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

g) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 78,83 persen dan dapat terealisasi sebesar 78,27 persen dengan capaian kinerja sebesar 99,93 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Pada tahun 2025 total rumah layak huni sebanyak 155.677 unit dari total seluruh rumah sebanyak 192.028 unit dan masih terdapat 36.351 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sambas. Selain itu, pada tahun 2025 jumlah peningkatan bantuan kualitas rumah tidak layak huni pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurun.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap, antara lain :

- a) Pembangunan Infrastruktur Strategis melalui monitoring intensif pada pembangunan Jembatan Sambas Besar untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu proyek sebagai konektor utama.
- b) Inpres Jalan Daerah melalui percepatan perbaikan jalan antar kecamatan dan desa untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang menjadi prioritas pemerintah pusat.



- c) Optimalisasi Anggaran mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Sambas secara proaktif meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat Pembangunan.
- d) Kolaborasi Lintas Sektor dengan meningkatkan sinergi antar pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten) agar pembangunan infrastruktur lebih merata dan tepat sasaran.
- e) Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaksanakan program Pembangunan “jembatan berkemajuan” dengan dana non APBD.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	14 Program	100,68	78.10	22,58

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 6 (enam) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 14 (empat belas) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 336.436.170.318,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 262.767.062.496,00 atau 78,10 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,68 persen dan Persentase realisasi anggaran sebesar 78,10 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,58 persen.



SASARAN 7

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi *“meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemda.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 7 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	70 (BB)	78,80 (BB)	112,57%
2	Nilai SAKIP	-	70 (BB)	64,39 (B)	91,99%
3	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda	-	WTP	N/A	N/A
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Sasaran 7					N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat nilai 75,6 dengan predikat “BB” dengan capaian kinerja 112,57 persen dan dikategorikan tercapai dan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu memperoleh nilai 64,39 dengan predikat “B” dengan capaian kinerja 90,86 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.



Tabel 41
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	75,6 (BB)	108%	70 (BB)	78,80 (BB)	112,57%
2.	Nilai SAKIP	70 (BB)	63,60 (B)	90,86%	70 (BB)	64,39 (B)	91,99%
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,2 poin dari tahun 2024 dan nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami peningkatan nilai sebesar 0,79 poin persen dari tahun 2024. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Tabel 42
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,68	70,44	75,60	78,80
2.	Nilai SAKIP	63,34	64,53	63,60	64,39
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	N/A

Sumber : Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama periode 2022 hingga 2025 indeks reformasi birokrasi telah meningkat sebesar 15,12 poin. Nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 nilai SAKIP mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2025. Selama periode 2022 hingga 2025 nilai SAKIP telah meningkat sebesar 1,05 poin Sedangkan untuk capaian opini BPK



terhadap laporan keuangan pemda tahun 2025 masih dalam proses evaluasi. Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerima opini WTP sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut dari tahu 2018 hingga 2024.

Tabel 43
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	78,80	80 (A)	Tidak Ada
2.	Nilai SAKIP	64,39	80 (A)	Tidak Ada
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	N/A	WTP	Tidak Ada

Sumber: Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas baru mencapai 98,5 persen dari target akhir RPJMD dan nilai SAKIP baru mencapai 80,49 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 7, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2025, pemerintah sedang menyusun regulasi RB Nasional, yaitu *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB. Untuk itu, penilaian reformasi birokrasi tahun 2025 merupakan tindaklanjut hasil rekomendasi indeks reformasi tahun 2024. Pada tahun 2025 indeks RB Kabupaten Sambas mendapat nilai 78,80 dengan predikat “BB”. Adapun capaian indikator kinerja reformasi general adalah sebagai berikut :

- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada tahun 2025 mendapat skor 3 dengan skor index 1,8 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.



- b) Tingkat Maturitas SPIP pada tahun 2025 mendapat nilai 3,07 dengan skor index 2.46 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,01 dari tahun 2024.
- c) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI pada tahun 2025 mendapat skor 0,5 dengan skor index 0,5 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.
- d) Nilai SAKIP pada tahun 2025 mendapat nilai 64,39 dengan skor index 2,58 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,79 dari tahun 2024.
- e) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada tahun 2025 tidak mendapat nilai atau skor index 0. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sambas belum mempunyai arsitektur SPBE.
- f) Tingkat Digitalisasi Arsip pada tahun 2025 mendapat nilai 87,26 dengan skor index 2,18 poin dan mengalami penurunan nilai sebesar 4,47 dari tahun 2024.
- g) Tingkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan pada tahun 2025 mendapat nilai 3 dengan skor index 1,5 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 2 dari tahun 2024.
- h) Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2025 mendapat nilai 61,5 dengan skor index 1,54 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 61,5 dari tahun 2024.
- i) Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025 mendapat nilai 98,12 dengan skor index 2,45 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 20,18 dari tahun 2024.
- j) Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 mendapat nilai 2,69 dengan skor index 1,34 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.
- k) Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tahun 2025 mendapat nilai 71,31 dengan skor index 1,78 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,04 dari tahun 2024.
- l) Indeks Sistem merit pada tahun 2025 mendapat nilai yang sama yaitu 281,5. Hal ini dikarenakan untuk penilaian sistem merit pada tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga menggunakan nilai tahun 2023.



- m) Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 mendapat nilai 4,33 dengan skor index 1,73 poin dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,07 dari tahun 2024.
- n) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2025 mendapat nilai 89,61 dengan index 1,79 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.
- o) Indeks SPBE pada tahun 2025 mendapat nilai 2,91 dengan indeks 5,24 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.
- p) Opini BPK pada tahun 2025 mendapat predikat WTP dengan skor index 5 poin. Predikat WTP ini merupakan Predikat WTP yang ke 8 secara berturut-turut.
- q) Tindaklanjut Rekomendasi pada tahun 2025 mendapat nilai 87,88 dengan index 3,52 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 1,38 dari tahun 2024.
- r) Indeks BerAKHLAK pada tahun 2025 mendapat nilai 67,39 dengan skor index 2,7 poin dan mendapat nilai yang sama dengan tahun 2024.
- s) Survei Penilaian Integritas pada tahun 2025 mendapat nilai 74,17 dengan skor index 7,42 poin dan mengalami penurunan nilai sebesar 0,93 dari tahun 2024.
- t) Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 mendapat nilai 85,79 dengan skor indeks 6,86 poin dan mengalami penurunan nilai sebesar 0,42 dari tahun 2024.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi antara lain :

- a) Melakukan tindaklanjut terhadap hasil catatan dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi tahun 2025.
- b) Menyusun rencana aksi RB Tematik transisi periode Road Map 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan dan harmonisasi oleh Kementerian PANRB.

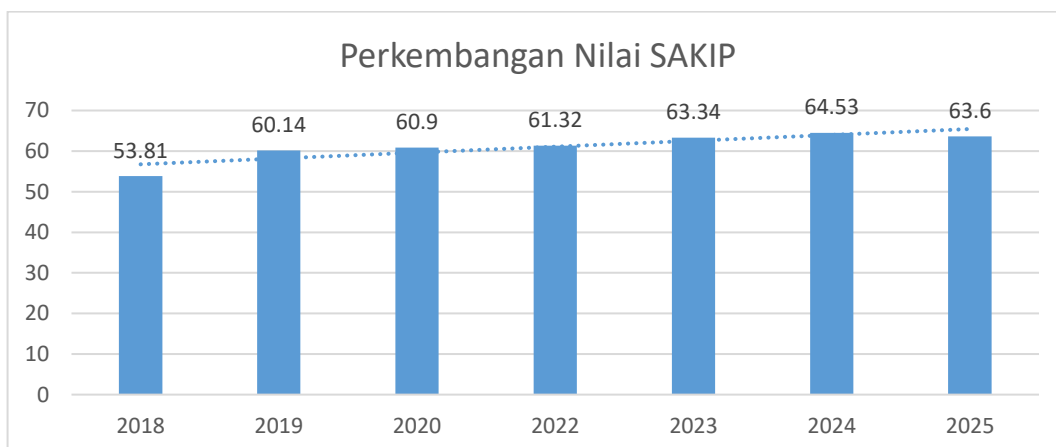


- c) Melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah yang mengampu indikator penilaian RB General dan RB Tematik.
- d) Membentuk Tim kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana SK Bupati Sambas Nomor 21/SETDA-OR/2024.

2. Nilai SAKIP

Perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami trend positif sejak 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu tahun 2018 s.d 2025. Nilai SAKIP mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2018 s.d 2023 dan mengalami penurunan nilai pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sebesar 0,70 dari tahun 2024. Perkembangan nilai SAKIP Sambas sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 7
Nilai SAKIP Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sambas Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten sambas belum bisa mencapai target nilai SAKIP yang telah ditentukan dengan mendapat predikat “BB” dengan nilai 70, nilai SAKIP tahun 2025 adalah 64,39 dengan predikat “B” dan dikategorikan tidak tercapai.

Belum tercapainya indikator nilai SAKIP dipengaruhi oleh beberapa catatan temuan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, antara lain :

- a) Pada indikator perencanaan kinerja, masih ditemukan kondisi kinerja yang belum sesuai levelnya sehingga indikatornya belum sepenuhnya



memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Tomebound (SMART) dan Cukup. Selain itu masih ditemukan penetapan target kinerja pada dokumen tingkat Kabupaten maupun PD belum melihat capaian kinerja atas kondisi kinerja sebelumnya, cenderung stagnan atau mengalami kenaikan yang sangat kecil tanpa penjelasan yang cukup, sehingga target yang ditetapkan tidak menantang dan realistis dan Penjenjangan/cascading kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja.

- b) Pada indikator pengukuran kinerja, Belum sepenuhnya indikator kinerja utama disertai definisi operasional khususnya pada Perangkat Daerah dan masih terdapat formulasi perhitungan indikator yang belum tepat dalam mengukur indikator kinerja utama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sambas menggunakan aplikasi e-Sakip. Implementasi media tersebut belum maksimal dalam pengukuran capaian kinerja khususnya level organisasi atau PD karena masih bersifat sebagai media pengumpulan dokumen AKIP.
- a) Pada indikator Pelaporan kinerja, laporan kinerja Pemda dan PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang simpulan capaian seluruh sasaran kinerja, benchmark kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan. Selain itu, masih ditemukan informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja khususnya pada PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.
- a) Pada indikator evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan



peningkatan capaian kinerja. Hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kinerja yang capaian kinerjanya belum sesuai.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja nilai SAKIP antara lain :

- a) Melakukan penyempurnaan dokumen akhir Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 2029. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini telah melalui evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan kaidah dan pedoman penyusunan RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Proses evaluasi dan tindak lanjut ini memastikan dokumen RPJMD sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang berorientasi hasil, komprehensif. Dengan demikian, dokumen RPJMD ini menjadi landasan yang kuat dan valid bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas dan terukur. Penyempurnaan dilakukan pada Bab 3 terkait Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah.
- b) Melakukan penyempurnaan atas target kinerja daerah pada Perda dokumen RPJMD dimana penetapan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi capaian pembangunan selama lima tahun terakhir sebagai dasar evaluasi kinerja dan landasan perencanaan ke depan. Penyempurnaan dilakukan pada penetapan target kinerja daerah pada Bab 3 tabel 3.2 dan Bab 4 Tabel 4.1 berisi Pagu, Indikator dan Target 2025 – 2029 setiap Perangkat Daerah.
- c) Menyusun pohon kinerja sesuai Dokumen Perda RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan dan mengacu dengan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon Kinerja telah mempertimbangkan CSF dalam setiap penjabaran antar tingkat Kinerja



dan melakukan identifikasi Kembali crosscutting Kinerja yang melibatkan keseluruhan PD.

- d) Menyusun Indiaktor Kinerja Utama (IKU) Bupati 2025-2030 yang disertai definisi operasional dan memverifikasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 2025-2030.
- e) Melaksanakan PKS antara Pemerintah Kab. Sambas dan Pemerintah Prov. Kalbar tentang Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP sebagaimana PKS Nomor : 02/TKKSD-TAPEM/PKS/2025 dan Nomor 100.2.2.3/02/SKU/RO-PEM. Aplikasi yang direplikasi akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga akan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja melalui data SIPD.
- f) Melakukan asistensi penyusunan LAKIP PD, dengan LAKIP PD harus memuat perbandingan target dan realisasi, analisis efisiensi anggaran, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD dan target nasional dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja serta upaya yang dilakukan dalam peningkatan capaian kinerja.
- g) Menjadikan laporan kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja kedepan sehingga target kinerja lebih realistis dan SMART, seperti contoh : Pertumbuhan Ekonomi dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 4,05 menjadi 4,8 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 4,69.
- h) Memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat memberikan solusi perbaikan yang nyata dan efektif terkait hal-hal yang menjadi kekurangan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.



- i) Mendorong agar OPD menindak lanjuti rekomendasi serta saran perbaikan atas hasil evaluasi AKIP dan melaksanakan reuiu terhadap penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sehingga dapat memastikan perencanaan telah selarash dengan RPJMD dan SMART.

3. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda

Pemerintah Kabupaten Sambas telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemda sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut dari tahun 2018 s.d 2024. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda mendapat Predikat “WTP”, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan capaian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain :

a) Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten sambas telah berhasil melaksanakan tingkat sistem pengelolaan keuangan dan aset dengan sangat baik dengan realisasi 100 persen. Hal ini di dukung dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi Pemerintah dengan berlandaskan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan kepatuhan Peraturan perundang-undangan. Selain itu, implementasi palaporan BMD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan telah dilakukan pengamanan terhadap aset tanah dan optimalisasi aset daerah.

b) Maturitas penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 telah menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP SPIP berada pada level 3 (tiga) dengan kategori terdefinisi dari level 5 (lima) dengan nilai 3,070. atau telah memenuhi karakteristik maturitas. Capaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 dipengaruhi oleh langkah-langkah proses penilaian mandiri



maturitas penyelenggaraan SPIP telah sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Selain itu, karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan yaitu pada kualitas perencanaan daerah, serta pengendalian internal telah dilaksanakan namun belum optimal.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda antara lain :

- a) Memperluas cakupan dan konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan bukti dokumen yang valid dan sah dan transaksi non RKUD.
- b) Percepatan penyampaian reviu dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas unaudit kepada BPK.
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis kepada aparatur pengelola BMD dan percepatan sertifikasi asset tanah melalui sinergitas bersama pengacara neara dalam penanganan asset yang sengketa.
- d) Perbaikan perencanaan kinerja berbasis risiko dengan penyelarasan sasaran strategis, indikator SMART-C, dan orientasi outcome sampai level program/kegiatan.
- e) Peningkatan kapasitas SDM melalui pemanfaatan standar kompetensi untuk rekrutmen, pengembangan dan penempatan jabatan serta pelatihan manajemen risiko anti-fraud.
- f) Penerapan SPIP dan manajemen risiko secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah, termasuk penyusunan RTP yang di dukung pendanaan memadai dan pelaporan berkala.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 7 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 44
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	24 Program	N/A	93,38	N/A

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 7 (tujuh) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 24 dua puluh empat) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dan Inspektorat Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 455.127.960.427,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp424.989.332.248,00 atau 93,38 persen dari yang telah dianggarkan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih belum bisa diukur dikarenakan capaian kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

SASARAN 8 “Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri”

“Meningkatnya Status kemajuan mandiri” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan local dan investasi.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Desa Mandiri.



Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 8 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	195	190	97,44%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 195 desa dengan realisasi sebesar 190 desa dengan capaian 97,44 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 46
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa Mandiri	189	189	100%	195	190	97,44%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah desa mandiri tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) desa jika dibandingkan dengan tahun 2024, namun mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 2,56 persen.

Tabel 47
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Desa Mandiri	119	168	189	190

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, jumlah desa mandiri telah meningkat sebanyak 71 desa. Pada tahun 2022, jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas adalah 119 desa dan pada tahun 2025 mencapai 190 desa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 48
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Jumlah Desa Mandiri	190	140	Tidak Ada

Sumber : Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas pada tahun 2025 telah melebihi dari target akhir RPJMD dengan capaian kinerja 135,71 persen dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 8 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri

Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025 di Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemandirian dan Kemandirian Desa. Pada Tahun 2025, dari 195 desa di Kabupaten Sambas sebanyak 190 desa dengan status desa mandiri dan 5 desa dengan status desa maju. Artinya, pada Tahun 2025 di Kabupaten Sambas tidak terdapat lagi desa berkembang dan desa tertinggal.

Belum tercapainya target status desa mandiri pada tahun 2025 dikarenakan proses adaptasi instrument baru, yakni dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID). Sebagai tahun pertama



implementasi penuh terdapat berbagai tantangan teknis dan strategi antara lain :

- a) Hambatan teknis dan digitalisasi yaitu adaptasi sistem baru, kendala input data dan akurasi data.
- b) Hambatan tatakelola SDM yaitu terbatasnya kualitas aparatur desa dan kualitas verifikasi di tingkat Kecamatan dan kabupaten yang sering kali menghadapi kendala waktu karena periode pendataan yang serentak.
- c) Hambatan ekonomi yaitu tantangan dalam mengintegrasikan potensi desa dengan program nasional seperti “koperasi merah putih” khususnya terkait kesenjangan aksesibilitas dimana masih banyak desa yang mengalami keterbatasan anggaran pembangunan fisik yang massif.
- d) Hambatan partisipasi sosial yaitu masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam musyawarah desa untuk penetapan data ID.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah desa mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi intensif dalam rangka transisi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) dan melakukan pembekalan teknis kepada tim pendata desa dan perangkat desa agar menginput data dengan valid.
- 2) Optimalisasi BUMDes dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), salah satunya melalui layanan internet desa.
- 3) Fokus pada sektor pertanian dengan mengembangkan potensi Sambas sebagai lumbung padi dan hortikultura (cabai, buah naga) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.
- 4) Percepatan kemandirian ekonomi desa melalui fasilitasi koperasi merah putih sesuai mandat nasional sebagai penggerak ekonomi baru.
- 5) Mendorong pembentukan klaster inovasi desa untuk mengoptimalkan potensi produk unggulan desa agar memiliki nilai tambah ekonomi tinggi.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 8 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	6 Program	97,44	99,76	-2,32

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 8 (delapan) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 6.230.920.321,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.215.869.609,00 atau 99,76 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,44 dan Persentase realisasi anggaran sebesar 99,76 persen, maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

SASARAN 9 **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**

“Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 9 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76,65	71,63	93,45%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 76,65 dengan realisasi sebesar 71,63 dengan capaian 93,45 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 51
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98	67,56	91,32%	76,65	71,63	93,45%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten sambas pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,07 jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9
Tahun 2022-2025

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualias Lingkungan Hidup	67,20	71,31	67,56	71,63

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 IKLH Kabupaten Sambas mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2025. Selama periode 2022



sampai 2025, IKLH Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sebesar 4,43. Pada Tahun 2022, IKLH Kabupaten Sambas adalah 67,20 dan pada tahun 2025 mencapai 71,63.

Tabel 53
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,63	66,50	Tidak Ada

Sumber : Baperida Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas tahun 2025 telah mencapai target akhir RPJMD dengan capaian 107,71 persen dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 9 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2025, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sambas sebesar 71,63 dan berada paa kategori sedang. Perhitungan nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2025 diperoleh dari 6 (enam) lokasi pemantauan kualitas air, 4 (empat) lokasi pemantauan kualitas udara dan 60 (enam puluh) data pemantauan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sambas. Data pemantauan kualitas lingkungan ini merupakan kontribusi dari pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.

Belum tercapainya target IKLH Kabupaten Sambas pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi IKLH Kabupaten Sambas antara lain :

- Pada Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai bagian nilai komposit IKLH secara rumusan dan aturan terjadi perubahan koefisien saat paparan sosialisasi perhitungan IKA-INA dengan Peraturan Menteri Lingkungan



Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

- b) Pada Indeks Kualitas Udara (IKU) adanya penambahan parameter PM_{2,5} yang menunjukkan tingkat konsentrasi pencemaran yang diakibatkan oleh kebakaran lahan, tingginya aktivitas transportasi, debu jalanan dan aktivitas konstruksi. Semakin tinggi konsentrasi PM_{2,5} di udara maka semakin rendah capaian IKU di suatu daerah
- c) Pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan karena adanya perubahan nilai koefisien beberapa kelas tutupan lahan antara paparan sosialisasi perhitungan IKL dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup sehingga pada saat simulasi perhitungan IKL untuk pelaporan yang seharusnya sudah mencapai target menjadi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai IKL Tahun 2025 dihitung berdasarkan 23 kelas tutupan lahan dan luasan RTH yang berdasarkan pada penafsiran menggunakan citra satelit di aplikasi google earth, dimana tidak semua wilayah di Kabupaten Sambas dilakukan plotting tutupan vegetasinya. Selain itu faktor koreksi gambut tidak dihitung seperti acuan yang tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025.
- d) Penurunan kualitas air disebabkan masih tingginya sumber pencemar yang berasal dari limbah domestik dan adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada badan air permukaan
- e) Penurunan kualitas udara disebabkan karena pada saat pemasangan Passive Sampler dengan rentang waktu selama 14 hari, kondisi cuaca di lapangan lebih dominan dalam kondisi cerah, baik pada semester pertama maupun semester kedua. Musim kemarau dapat mempengaruhi kualitas udara ambien karena tidak terjadi proses peluruhan polutan di udara.



Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup antara lain :

- a) Pemahaman masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang terkait dengan wilayahnya perlu di tingkatkan agar masyarakat mampu mencermati dan mengkritisi berbagai aktifitas yang akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti pembangunan pusat aktivitas baru (pabrik, industri, pertokoan, pusat perbelanjaan).
- b) Revitalisasi Ekosistem dan Tutupan Lahan dengan melakukan penanaman pohon kembali di lahan kritis dan rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
- c) Pengelolaan Air Sungai dengan cara mengatasi penurunan kualitas air sungai melalui pembangunan IPAL komunal, pengawasan limbah industri, dan pengurangan sampah di sungai.
- d) Pengendalian Kualitas Udara dengan mengendalikan pembakaran sampah dan mempromosikan teknologi ramah Lingkungan.
- e) Peningkatan Sarana Pengelolaan Sampah dengan menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan dan desa.
- f) Diperlukan regulasi untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang publik sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya hal-hal yang berpotensi untuk mengurangi nilai IKLH, terutama lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan terbuka hijau dan lahan untuk penghijauan.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 9 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :



Tabel 54
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 9

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan yang mendukung	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Program	93,45	92,89	0,56

Sumber : Baperida kabupaten Sambas dan Bakeuda Kabupaten Sambas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk mencapai kinerja sasaran 9 (sembilan) pada tahun 2025 didukung APBD dengan 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Sambas dengan anggaran sebesar Rp. 14.433.527.718,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.407.120.311,00 atau 92,89 persen dari yang telah dianggarkan. Apabila dibandingkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 93,45 dan Persentase realisasi anggaran sebesar 92,89 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,56 persen.

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 yang diuraikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini merupakan LRA Per 31 Desember Tahun 2025 yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

a. Pendapatan Daerah:

<i>Target Tahun 2025</i>	<i>Realisasi Tahun 2025</i>	<i>%</i>
Rp 2.127.127.01.802	Rp 2.079.151.294.230,23	97,74

Rincian per jenis pendapatan dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:



1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
Rp 352.503.974.584	Rp 301.165.389.545,23	92,52

Berdasarkan target dan realisasi PAD di atas, capaian kinerja PAD Tahun 2025 sebesar 92,52 persen. Rincian PAD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
Pajak Daerah	111.437.914.476	88.209.658.712,45	79,15
Hasil Restribusi Daerah	175.176.555.044	175.949.254.940,30	100,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.885.787.658	3.885.787.658	100
Lain-lain PAD yang sah	35.003717.406	33.120.688.234,48	94,62
Jumlah	352.503.974.584	301.165.389.545,23	92,52

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

2) Pendapatan Transfer

Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
Rp 1.801.623.036.218	Rp. 1.777.985.904.685	98,68

Berdasarkan target dan realisasi dana pendapatan transfer, capaian kinerja pendapatan transfer tahun 2025 sebesar 98,68 persen, dengan rincian dana perimbangan tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 56
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat	1.718.993.009.000	1.687.122.144.040	98,14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.630.027.218	90.863.760.645	109,96
Jumlah	1.801.623.036.218	1.777.985.904.685	98,68

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025



3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

<i>Target Tahun 2025</i>	<i>Realisasi Tahun 2025</i>	<i>%</i>
Rp 0	Rp. 0	0

Berdasarkan target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, capaian kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar 0 persen. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 57
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
Pendapatan Hibah	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

b. Belanja Daerah

<i>Target Tahun 2025</i>	<i>Realisasi Tahun 2025</i>	<i>%</i>
Rp 2.209.760.872.279	Rp 2.079.151.294.230,23	97,74

Berdasarkan target dan realisasi Belanja Daerah di atas, capaian kinerja Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar 97,74 persen. Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2025 didukung oleh tersedianya input berupa anggaran belanja dalam APBD. Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 58
Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2025

Jenis Belanja	Target Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
Belanja Operasi	1.533.033.525.024	1.435.107.766.874,56	93,49



Belanja Modal	363.976.413.899	320.242.761.064	87,89
Belanja Tidak Terduga	325.000.000	99.763.180	30,69
Belanja Transfer	310.425.933.356	296.163.453.904	95,40
Jumlah Belanja Daerah	2.209.760.872.279	2.079.151.294.230,23	97,74

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025

3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

RPJMD Kabupaten Sambas menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh belanja daerah ditujukan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas. Sesuai definisi belanja tidak langsung, belanja ini diperuntukkan bagi setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan program yang mendukung masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas, berikut disajikan anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2025.

Tabel 59

Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.162.181.255	1.140.742.980	98,16
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	10.856.795	10.811.499	99,58
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.634.851	16.930.758	96,01
4	Program Pengembangan Ekspor	72.229.259	65.682.972	90,94
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.379.280.211	1.376.457.540	99,80
6	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	467.966.552	467.499.992	99,90
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	557.165.529	552.806.499	99,22



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.879.791.902	7.354.014.373	93,33
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.489.685.861	11.227.200.161	36,82
10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	423.005.082	420.091.482	99,31
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	463.203.643	342.251.643	73,89
12	Program Penyuluhan Pertanian	2.111.831.561	2.053.191.127	97,22
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.028.045.862	5.983.333.631	99,26
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.505.174.070	3.488.166.724	99,51
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	143.279.937	143.200.359	99,94
16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.590.368.399	1.510.399.831	94,97
17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.103.618.314	2.376.545.921	76,57
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.384.436	10.384.436	100
19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	143.785.948	137.980.932	95,96
20	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.999.919	4.999.919	100
21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	211.956.106	205.652.975	97,03
22	Program Pemasaran Pariwisata	815.355.131	811.258.974	99,50
23	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	89.912.000	89.912.000	100
24	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	83.593.161	82.625.831	98,84
25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31.472.234	31.200.354	99,14
26	Program Promosi Penanaman Modal	10.891.828	10.891.828	100
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	71.595.450	71.403.721	99,73



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
28	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.647.481	25.398.414	99,03
29	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.816.000	2.791.400	99,13
30	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	285.356.000	280.816.631	98,41
31	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.207.194.000	996.784.000	82,57
32	Program Pengembangan UMKM	277.653.450	277.234.148	99,39
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.830.999.320	3.807.652.931	99,39
Jumlah Sasaran 1		66.508.931.547	45.376.315.986	68,23
2.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.232.756.213	4.163.235.100	98,36
2	Program Pengelolaan Pendidikan	136.494.273.780	134.256.354.536	98,36
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	397.686.166.182	383.155.624.755.07	96,35
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	383.240.248	373.592.816	97,48
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.613.084.495	2574009480	98,50
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.157.171.000	4.138.182.724	99,54
7	Program Pembinaan Perpustakaan	2.131.641.059	1.821.008.545	85,43
8	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	104.621.223	104.179.640	99,58
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	340.486.571	338.849.395	99,52
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.145.890.705	10.069.897.477	99,25
11	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	364.999.291	183.276.600	50,21
12	Program Perlindungan Perempuan	381.600.488	379.792.350	99,53



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	169.999.601	164.224.330	96,60
14	Program Pemenuhan Hak Anak	103.645.459	103.195.700	99,57
15	Program Perlindungan Khusus Anak	181.688.830	181.303.900	99,79
16	Program Pengendalian Penduduk	648.699.677	648.126.250	99,91
17	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.989.645.548	3.976.085.700	99,66
18	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.203.548.350	4.199.082.140	99,89
Jumlah Sasaran 2		568.333.158.720	550.830.021.438.07	96,92
3.	Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan			
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.316.620	13.316.200	100
2	Program Rehabilitasi Sosial	251.807.126	244.343.902	97,04
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	97.246.474	96.781.850	99,52
4	Program Penanganan Bencana	182.760.009	176.306.800	96,47
5	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	43.240.331	43.213.600	99,94
6	Program Pemberdayaan Sosial	306.076.766	303.371.300	99,12
Jumlah Sasaran 3		894.447.236	877.333.652	98,09
4.	Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	117.212.474	116.706.900	99,57
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	203.127.319	202.787.900	99,83
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.081.225.212	2.060.606.300	99,01
4.	Program Hubungan Industrial	345.374.734	343.081.728	99,34
Jumlah Sasaran 4		2.746.939.739	2.723.182.828	99,14
5.	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana			
1	Program Penanggulangan Bencana	582.959.466	580.545.575	99,59
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	481.643.381	481.638.138	99,99
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.428.075.297	2.859.538.391	83,42



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Jumlah Sasaran 5		4.492.678.144	3.921.722.104	87,29
6.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	166.217.051.546	131.397.718.733	79,05
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.036.581.145	1.036.081.947	99,95
3	Program Penataan Bangunan Gedung	9.518.079.445	8.060.075.849	84,68
4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.540.653.022	2.742.329.146	77,45
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	63.214.876.499	47.747.624.310	75,53
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.005.770.189	21.984.297.628	75,79
7	Program Pengelolaan Pelayaran	2.633.362.685	2.628.814.275	99,83
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	41.205.686.015	30.117.727.956	73,09
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.562.419.632	6.592.627.444	87,18
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.016.973.858	7.378.985.050	81,83
11	Program Pengembangan Permukiman	664.499.400	664.499.400	100
12	Program Pengembangan Perumahan	667.390.626	465.975.808	69,82
13	Program Kawasan Permukiman	486.825.739	285.958.950	58,74
14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.666.000.517	1.664.346.000	99,90
Jumlah Sasaran 6 :		336.436.170.318	262.767.062.496	78,10
7.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah	40.912.934.759	39.990.045.934	97,74
2	Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	25.339.901.769	24.128.246.223	95,22
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.567.417.087	3.417.522.938	95,80
4	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	33.580.488.175	33.318.326.311,78	99,22



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.777.531.558	19.585.069.175	99,03
6	Program Kepegawaian Daerah	1.680.832.196	1.630.591.135	97,01
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	824.134.258	822.538.100	99,81
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	798.348.110	705.273.642	84,34
9	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	790.374.635	741.472.565	93,81
10	Program Pendaftaran Penduduk	531.905.000	529.577.338	99,56
11	Program Pencatatan Sipil	300.000.000	299.658.860	99,86
12	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	391.122.409	380.936.921	97,40
13	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	96.121.783	96.121.783	100
14	Program Aplikasi Informatika	427.734.496	417.525.081	97,61
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	712.975.909	711.383.809	99,78
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	126.992.634	123.615.434	97,34
17	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	101.365.979	97.569.582	96,25
18	Program Pengelolaan Arsip	6.753.612	6.633.612	98,22
19	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	338.244.698	254.103.280	75,12
20	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	317.947.042.933	290.999.435.799,27	91,52
21	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.575.003.669	1.468.537.606	93,24
22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.186.049.620	3.159.583.337	99,17
23	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.927.449.232	1.922.375.025	99,74
24	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	187.235.906	183.188.757	97,84
Jumlah Sasaran 7 :		455.127.960.427	424.989.332.248	93,38
8.	Sasaran : Meningkatnya Status Kemajuan Desa			



No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	34.999.692	34.831.300	99,52
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.557.098.570	4.544.166.240	99,72
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.095.885.952	1.095.054.429	99,92
4	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	255.079.262	254.414.790	99,74
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	168.953.830	168.943.500	99,99
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	118.903.015	118.459.350	99,63
Jumlah Sasaran 8 :		6.230.920.321	6.215.869.609	99,76
9.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
1	Program Pengelolaan Persampahan	10.010.110.944	9.701.258.770	96,91
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	198.039.850	193.392.660	97,65
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	19.716.900	98,58
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.910.759.326	3.202.169.639	81,88
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	109.569.889	108.726.000	99,23
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	185.047.709	181.856.342	98,28
Jumlah Sasaran 9 :		14.433.527.718	13.407.120.311	92,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Sambas Tahun 2025. Tujuan penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran terhadap tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Sambas yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dan indikator yang belum rilis, akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2025 dapat dikatakan tercapai.

Berikut ini adalah hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai capaian kinerja sebesar 89,43 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai capaian sebesar 100,45 persen dan dikategorikan berhasil;
3. Indikator Angka Kemiskinan dengan nilai capaian kinerja sebesar 106,75 persen dan dikategorikan berhasil;
4. Indikator Indeks Gini dengan nilai capaian kinerja sebesar 87,37 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
5. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,80 dan dikategorikan tidak berhasil;
6. Indikator Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja sebesar 136,83 persen dan dikategorikan berhasil;
7. Indikator Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja sebesar 100,68 persen dan dikategorikan berhasil;



8. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja sebesar 112,57 persen dan dikategorikan berhasil
9. Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 91,99 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
10. Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda belum terdapat capaian, karena belum ada rilis resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
11. Indikator Jumlah Desa Mandiri dengan capaian kinerja sebesar 97,44 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
12. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 93,45 persen dan dikategorikan tidak berhasil.

Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui program dan kegiatan serta anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yang berjumlah sebesar Rp. 1.440.771.206.452 dan dapat direalisasikan sebesar 1.297.700.840.361 atau 90,07 persen.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat namun masih dibayangi oleh dampak negatif pandemi covid 19, ancaman resesi global dan perubahan iklim.
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas.
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
4. Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
5. Indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup
6. Prevalensi stunting yang sudah mulai menurun namun masih berada pada zona merah stunting di Kalimantan Barat



7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim
9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
10. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Kedepan

Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya dalam perbaikan kinerja kedepan dengan melakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Komponen perencanaan kinerja

Perbaikan kinerja yang dilakukan pada komponen perencanaan kinerja antara lain :

- a) Melakukan penyempurnaan dokumen akhir Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 2029. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini telah melalui evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan kaidah dan pedoman penyusunan RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Proses evaluasi dan tindak lanjut ini memastikan dokumen RPJMD sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang berorientasi hasil, komprehensif. Dengan demikian, dokumen RPJMD ini menjadi landasan yang kuat dan valid bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas dan



terukur. Penyempurnaan dilakukan pada Bab 3 terkait Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan.

- b) Melakukan penyempurnaan atas target kinerja daerah pada Perda dokumen RPJMD dimana penetapan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi capaian pembangunan selama lima tahun terakhir sebagai dasar evaluasi kinerja dan landasan perencanaan ke depan. Penyempurnaan dilakukan pada penetapan target kinerja daerah pada Bab 3 tabel 3.2 dan Bab 4 Tabel 4.1 berisi Pagu, Indikator dan Target 2025 – 2029 setiap Perangkat Daerah.
- c) Menyusun pohon kinerja sesuai Dokumen Perda RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan dan mengacu dengan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon Kinerja telah mempertimbangkan CSF dalam penjabaran antar tingkat Kinerja dan melakukan identifikasi Kembali crosscutting Kinerja yang melibatkan keseluruhan PD.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Perbaiki kinerja yang dilakukan pada komponen pengukuran kinerja antara lain :

- a) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati 2025-2030 yang disertai definisi operasional dan memverifikasi penyusunan IKU Perangkat Daerah 2025-2030.
- b) Melaksanakan PKS antara Pemerintah Kab. Sambas dan Pemerintah Prov. Kalbar tentang Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP sebagaimana PKS Nomor : 02/TKKSD-TAPEM/PKS/2025 dan Nomor 100.2.2.3/02/SKU/RO-PEM. Aplikasi yang direplikasi akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga akan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja melalui data SIPD.

3. Komponen Pelaporan Kinerja.

Perbaiki kinerja yang dilakukan pada komponen pelaporan kinerja antara lain :



- a) Melakukan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dengan wajib memuat :
 - 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja
 - 2) Analisis efisiensi anggaran
 - 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya
 - 4) Membandingkan realisasi kinerja dengan beberapa tahun terakhir.
 - 5) Membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD dan Target Nasional (jika ada)
 - 6) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja
 - 7) Upaya yang dilakukan dalam peningkatan capaian kinerja.
 - b) Menjadikan laporan kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja kedepan sehingga target kinerja lebih realistis dan SMART, seperti contoh : Pertumbuhan Ekonomi dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 4,05 menjadi 4,8 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 4,69
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Perbaikan kinerja yang dilakukan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain :
- a) Memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat memberikan solusi perbaikan yang nyata dan efektif terkait hal-hal yang menjadi kekurangan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah.
 - b) Mendorong agar OPD menindak lanjuti rekomendasi serta saran perbaikan atas hasil evaluasi AKIP dan melaksanakan reviu terhadap penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sehingga dapat memastikan perencanaan telah selaroh dengan RPJMD dan SMART.



Dalam rangka mencapai kinerja pada tema dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yakni **“Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Sambas Berkemajuan yang Terunggul di Kalimantan Barat”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Penguatan Transformasi Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial)
2. Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Unggulan, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Iptek dan Inovasi serta Optimalisasi Wilayah Perbatasan);
3. Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui Transformasi Tata Kelola (Optimasi Regulasi, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik dan Pelaksanaan SPBE yang Berintegritas serta Adaptif).
4. Menyelaraskan program prioritas tahun 2025 dengan 9 program unggulan daerah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain :
 - a) Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP, Tema Sipindu, Rusimah dan Green Growth).
 - b) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0% (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP dan Pemuda Siap Kerja).
 - c) Program Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (selaras dengan Program Unggulan Daerah Pemuda Siap Kerja).
 - d) Program Pembangunan Perbatasan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP).

Sambas, Maret 2026
BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SATONO, S.Sos, I.M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sambas, Januari 2025



BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos, I.M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,3
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,80
		Indeks Gini	0,265
4.	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,9
5.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	150,13
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	75,15
7.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP	BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
8.	Meningkatnya status kemajuan desa	Jumlah Desa Mandiri	195
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,65

No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	1.179.000.000,00
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	30.000.000,00
3	Program Pengembangan Ekspor	374.713.568,00
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.444.992.667,00
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	539.980.462,00
6	Program Stabilitasii Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	540.286.256,00
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.914.549.152,00
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.689.263.949,00

No.	Program	Anggaran
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.767.500,00
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	632.332.414,00
11	Program Penyuluhan Pertanian	3.105.779.151,00
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.444.998.343,00
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.999.989.177,00
14	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	149.999.866,00
15	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.661.639.951,00
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.901.011.174,00
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.999.396,00
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	294.929.785,00
19	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.057.672,00
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	394.998.238,00
	Program Pemasaran Pariwisata	1.117.000.000,00
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	283.000.600,00
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	121.160.000,00
23	Program Promosi Penanaman Modal	97.337.000,00
24	Program Pelayanan Penanaman Modal	301.000.000,00
25	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	222.503.000,00
26	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	80.000.000,00
27	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	99.600.000,00
28	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	300.000.000,00
29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	90.400.000,00
30	Program Pengembangan UMKM	638.950.880,00
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.839.348.950,00
32	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.509.500,00
33	Program Pengelolaan Pendidikan	133.578.814.213,00
34	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	387.337.095.934,00
35	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	404.195.248,00
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.026.769.347,00
37	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.235.671.000,00
38	Program Pembinaan Perpustakaan	3.395.538.830,00
39	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	121.116.773,00

No.	Program	Anggaran
40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	524.999.140,00
41	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	50.000.000,00
42	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.360.766.675,00
43	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	429.394.566,00
44	Program Perlindungan Perempuan	435.647.410,00
45	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	18.028.348,00
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	202.777.945,00
47	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	130.634.256,00
48	Program Perlindungan Khusus Anak	253.522.343,00
49	Program Pengendalian Penduduk	579.600.056,00
50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.904.756.088,00
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.370.926.996,00
52	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	24.983.998,00
53	Program Rehabilitasi Sosial	301.314.795,00
54	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	496.923.144,00
55	Program Penanganan Bencana	104.876.892,00
56	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	67.995.711,00
57	Program Pemberdayaan Sosial	93.186.142,00
58	Program Perencanaan Tenaga Kerja	295.973.948,00
59	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	312.720.477,00
60	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.816.749.793,00
61	Program Hubungan Industrial	139.936.682,00
62	Program Penanggulangan Bencana	1.438.436.339,00
63	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	663.444.064,00
64	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.332.998.391,00
65	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	20.000.072,00
66	Program Penatagunaan Tanah	563.000.160,00
67	Program Penyelenggaraan Jalan	272.547.139.781,00
68	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	442.999.673,00
69	Program Penataan Bangunan Gedung	6.964.999.754,00
70	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.130.000.515,00
71	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54.424.081.897,00
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.999.658.584,00
73	Program Pengelolaan Pelayaran	1.828.369.584,00

No.	Program	Anggaran
74	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	36.115.516.047,00
75	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.155.261.355,00
76	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.705.077.589,00
77	Program Pengembangan Perumahan	364.000.398,00
78	Program Kawasan Permukiman	315.634.898,00
79	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	795.359.822,00
80	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	40.617.230.720,00
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.580.753.496,00
82	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.048.437.016,00
83	Program Pengelolaan Perbatasan	499.999.951,00
84	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.380.388.241,00
85	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	33.546.623.797,00
86	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20.302.376.203,00
87	Program Kepegawaian Daerah	2.489.222.098
88	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.646.370.723,00
89	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.019.679.170,00
90	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.444.000.325,00
91	Program Pendaftaran Penduduk	1.005.000.000,00
92	Program Pencatatan Sipil	550.000.000,00
93	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.304.643.060,00
94	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	105.756.940,00
95	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	702.319.721,00
96	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	849.917.878,00
97	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	341.662.569,00
98	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	198.337.951,00
99	Program Pengelolaan Arsip	150.176.844,00
100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.089.700.000,00
101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.392.465.427,00
102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	915.491.808,00
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.987.042.282,00

No.	Program	Anggaran
104	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	895.500.611,00
105	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.921.007.197,00
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	312.902.422.416,00
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.795.062.671,00
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.429.998.746,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.242.785.000,00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	386.776.758,00
111	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	66.586.149,00
112	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	73.413.796,00
113	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	239.999.351,00
114	Program Peningkatan Kerjasama Desa	85.000.212,00
115	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.340.246.194,00
116	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.189.894.800,00
117	Program Pengelolaan Persampahan	10.891.688.192,00
118	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	490.000.000,00
119	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000,00
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00
120	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.847.805.223,00
121	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	270.000.000,00
122	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	440.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 1.631.483.778.214,00

Sambas, Januari, 2025



BUPATI SAMPAS,

H. SATONO, S.Sos.I.,M.H.

**PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	-	5,3	4,74	89,43%
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71,76	72,08	100,45%
3.	Menurunnya angka kemiskinan	3. Angka Kemiskinan	-	6.80	6.37	106,75%
		4. Indeks Gini	-	0.265	0,293	87,37%
4.	Menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	-	4,9	4,91	99,80
5.	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	6. Indeks Resiko Bencana	-	150,13	109,61	136,83%
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	7. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	%	58,91	59,31	100.68%
7.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	78,80 (BB)	112,57%
		9. Nilai SAKIP	Nilai	70 (BB)	64,39 (B)	91,99%
		10. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	N/A	N/A
7.	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	11. Jumlah Desa Mandiri	Desa	195	190	97,44%
8.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76,65	71,63	93,45%



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Jl. Pembangunan Sambas Nomor 82, Kec. Sambas, Sambas, Kal-Bar (79462)
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443 Pos-el : setda.kab.sbs@gmail.com
Laman : www.sambas.go.id